

PENERAPAN TEORI RESOLUSI
KONFLIK DALAM FILSAFAT ILMU

MENCARI *SAFETY*
VALVE UNTUK
TOGATEN

WIDIASTUTI

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Widiastuti

Penerapan Teori Resolusi Konflik dalam Filsafat Ilmu:
Mencari *Safety Valve* untuk Togaten

Semarang: CV RAFI SARANA PERKASA, 2018
xii + 160 hlm; 15 x 21 cm

Penerapan Teori Resolusi Konflik dalam Filsafat Ilmu:
Mencari *Safety Valve* untuk Togaten

Penulis: Widiastuti
Desain Cover: CV Rafi Sarana Perkasa
Desain Layout: Widiastuti

Cetakan pertama, Juni 2014
Cetakan kedua, Oktober 2018

Diterbitkan oleh
Villa Ngaliyan Permai E-09 Semarang

© Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Dengan memanjatkan syukur *alhamdulillah*, berkat rahmat Allah SWT kami dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian individual dengan judul *MENCARI SAFETY VALVE UNTUK TOGATEN*.

Penelitian ini merupakan salah satu kegiatan yang difasilitasi Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang dengan bantuan anggaran dana bantuan penelitian DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.

Penyelesaian laporan hasil penelitian ini tidak dapat peneliti lakukan tanpa bantuan pihak lain. Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak berjasa dalam penelitian ini. utamanya kepada:

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas penelitian berupa bantuan anggaran penelitian DIPA IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.
3. Pihak Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang.
4. Pihak Pemerintah Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga beserta segenap jajarannya.
5. Pihak RT, RW wilayah Togaten dan sekitarnya beserta segenap warga yang telah menjadi responden penelitian ini.
6. Pihak SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga beserta jajaran pengurus organisasi yang menaunginya.

Peneliti sadar sepenuhnya bahwa laporan penelitian ini masih memerlukan perbaikan dari beberapa aspek. Dengan demikian upaya pengembangan ide dan konsep dalam penelitian sejenis ini memerlukan masukan-masukan untuk perbaikan lebih lanjut.

Selanjutnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, utamanya civitas akademika IAIN Walisongo Semarang dan masyarakat pemerhati keilmuan pada umumnya.

Semarang, Oktober 2014
Penulis



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax.7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/P.1/TL.01/ 679 /2014

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian
Individual yang berjudul:

MENCARI SAFETY VALVE UNTUK TOGATEN

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Widiastuti, M.Ag
NIP : 19750319 200901 2 003
Pangkat/Jabatan: Penata Muda Tk. I (III/b)
Fakultas : Ushuluddin

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 14 Agustus 2014

Ketua .


Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1004

DAFTAR ISI

Halaman Judul 1	__i
Undang-undang Hak Cipta	_ii
Halaman Judul 2	_iii
Katalog	_iv
Pengantar Penulis	_v
Surat Keterangan	_vii
Daftar Isi	_viii
Abstrak	_____x

BAB I.

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah__1
- B. Rumusan Masalah__6
- C. Pembatasan Masalah__6
- D. Signifikansi Penelitian__7
- E. Kajian Riset Sebelumnya__7
- F. Kerangka Teori__9
- G. Metode Penelitian__14
- H. Instrumen Penelitian__19

BAB II.

LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman Teori__21
 - 1. Model Konsensus/ Resolusi Konflik__21

2. Metode Resolusi__23
3. Konsep Teori__25
- B. Penerapan Landasan Teori__45
 1. Penerapan Landasan Ontologis_48
 2. Penerapan Landasan Epistemologis & Aksiologis_57

BAB III.

MEMAHAMI *SETTING* SOSIO HISTORIS DAN TAHAPAN KONFLIK

- A. *Setting Sosio Historis*__64
 1. Obyek Subyek__64
 2. Peta Konflik__67
 3. Sejarah __72
 4. Kenyamanan & Keamanan_73
 5. Kepadatan Penduduk __76
 6. Kehidupan Ekonomi-Sosial__80
 7. Kehidupan Keagamaan__83
- B. Tahapan Konflik__88
 1. Konflik Tahap I__90
 2. Konflik Tahap II__91
 3. Konflik Tahap III__94

BAB IV.

***SAFETY VALVE* DAN KONTRIBUSI NILAI-NILAINYA**

- A. *Safety Valve* sebagai Resolusi Konflik__104
- B. Resolusi Konflik Realistis__107
- C. Resolusi Konflik Non Ralistis__115
- D. Kontribusi Nilai *Safety Valve*__126

BAB V.

PENUTUP

- A. Kesimpulan__138

B. Saran-saran__140

Daftar Pustaka__142

Abstraction

Safety valve is one of the functionalism conflict's propositions. This is described by a German sociologist, Lewis A. Coser. I try to analyze this for Togaten's conflict. We have to find the conflict reality, whether the conflict is realistic or not? When we find that this is a realistic conflict, we can be resolved by meeting the demands of the goal antagonist and the protagonist disappointment. But, if this is not a realistic conflict, we can not be resolved in that way. It is just a temporary conflict in their rival's relationship.

Key word:

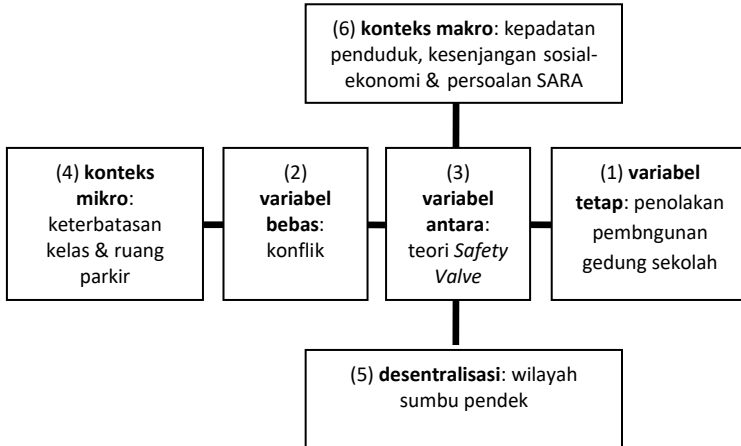
Lewis Coser, safety valve, Togaten

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terkait sosialisasi penelitian ini, pada tanggal 13 Mei 2014, Prof. Dr. Irwan Abdullah menjelaskan tentang 6 komponen penelitian, yaitu: (1) Variabel tetap sebagai fenomena yang menjadi daya tarik penelitian; (2) Variabel bebas sebagai asumsi peneliti tentang fenomena yang diamati; (3) Variabel antara sebagai benang merah antara variabel tetap dengan variabel bebas; (4) Konteks mikro sebagai persoalan lokal; (5) Desentralisasi atau karakteristik persoalan mikro terkait lokasinya; (6) Konteks makro, sebagai tinjauan persoalan secara umum. Semua komponen ini dibahas secara global dalam pembahasan latar belakang masalah.

Adapun skemanya adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema latar belakang masalah

1. Variabel tetap

Penelitian ini diawali fenomena konflik akibat penolakan pembangunan gedung baru SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga oleh sebagian warga. Penolakan itu adalah **variabel tetap** karena dilakukan secara terang-terangan dengan memasang beberapa *banner* berwarna kuning berukuran $\pm 1 \times 0,5$ m bertuliskan huruf kapital berwarna merah menyala: “WARGA PENGILON RT 07/ RW 03 MENOLAK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DI WILAYAH INI.”

2. Variabel bebas

Pada umumnya, pembangunan gedung sekolah akan mendapatkan dukungan warga sekitar sebagai usaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk wilayah Togaten dan sekitarnya, karena rencana pembangunan gedung sekolah SD Muhammadiyah Plus di wilayah setempat justru memicu pro-kontra antara pihak warga sebagai *in group* dengan pihak sekolah sebagai *out group*. Dalam konteks ini maka **variabel bebas** -nya adalah asumsi peneliti yang memaknai pro-kontra pihak SD dengan warga sebagai indikasi adanya konflik *in group* dengan *out group*.

3. Variabel Antara

Adapun **variabel antara** nya adalah pemilihan teori fungsionalisme konflik Lewis A. Coser sebagai paradigma penelitian. Teori ini mengintegrasikan teori fungsionalisme struktural dengan teori konflik. Fokus penelitian terutama pada bagian teori fungsionalisme konflik yang disebut *safety valve* (katup penyelamatan), sebagai resolusi yang diharapkan tidak hanya memahami masyarakat dari perspektif fungsionalisme struktural saja, yang beranggapan bahwa masyarakat merupakan sistem yang tidak dapat berfungsi tanpa hubungan dengan bagian yang lain namun juga untuk memahaminya dari

perspektif teori konflik, yang beranggapan bahwa masyarakat merupakan satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai kepentingan berbeda (Raho, 2007: 48, 71).

Mekanisme dalam *safety valve* tersebut peneliti anggap sebagai *win-win solution*, karena masing-masing pihak tidak hanya memikirkan bagaimana kepentingan kelompok mereka terpenuhi, tetapi juga saling mengerti bahwa mereka adalah satu sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Perasaan sebagai satu kesatuan ini akan membuat kerenggangan lebih mudah direkatkan sehingga konflik yang telah berjalan selama hampir satu tahun ini tidak terus berkobar.

4. Konteks mikro

Konteks mikro yang menjadi alasan pembangunan gedung sekolah SD Muhammadiyah Plus yang baru di wilayah Pengilon antara lain adalah karena pembangunan gedung di lahan lama (Togaten) sudah tidak memungkinkan, sementara pihak sekolah masih memerlukan penambahan beberapa ruang seperti aula, gedung olah raga dan tempat parkir yang memadai. Rencana ini ditolak warga Pengilon karena persoalan kemacetan, kebisingan dan persoalan ijin.

5. Desentralisasi

Konflik di Togaten dan sekitarnya ini jelas terkait persoalan **desentralisasi** atau faktor lokasi, sebab persoalan yang sama, belum tentu menjadi sumber konflik jika terjadi di wilayah lain. Dengan demikian, wilayah Togaten dan sekitarnya termasuk wilayah bersumbu pendek. Sensitifitas atau kerentanan terjadinya konflik di wilayah tersebut relatif tinggi dibandingkan wilayah lain.

6. Konteks Makro

Konteks makro konflik ini terkait dengan penyebab sensitifitas Togaten sebagai wilayah bersumbu pendek, yaitu:

- a. Faktor kepadatan penduduk. Sebagai kampung di tengah perkotaan, Togaten berkepadatan penduduk tinggi. Padahal semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah maka semakin besar pula kemungkinan konflik yang akan muncul di dalamnya;
- b. Faktor kesenjangan ekonomi dan sosial. Sebagian warga sekitar Togate, hidup sangat sederhana (sebagai proletar), namun sebagian sangat berkecukupan (borjuis). SD Muhammadiyah Plus termasuk kelompok yang kedua;

- c. Faktor perbedaan agama. Isu SARA, terutama agama umumnya merupakan pemantik yang sangat efektif untuk membuat konflik menjadi besar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah: “Mengapa terjadi penolakan pembangunan gedung sekolah SD Muhammadiyah?”

Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu:

- a. Bagaimana konflik itu terjadi?;
- b. Bagaimana resolusi konfliknya dari perspektif *safety valve* Lewis A. Coser?

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka fokus penelitian ini terkait konflik yang terjadi antara SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga dengan warga sekitarnya dari aspek:

- a. Pemahaman aspek *ontologi* konflik (*realistis-non realistis*);

- b. Resolusi konflik dari aspek *epistemologi* (dengan metode *safety valve*) dan aksiologi (unsur yang dipertahankan & dihancurkan).

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

- a. bagi peneliti, untuk mengaplikasikan teori ke dalam kehidupan nyata;
- b. bagi pihak yang diteliti dan pihak lain yang mengalami problem serupa, sebagai salah satu peta untuk mendapatkan resolusi konflik yang mereka hadapi;
- c. bagi pembaca secara umum, sebagai wacana bahwa konflik tidak hanya disfungsional, namun bisa juga dilihat dari aspeknya yang fungsional.

E. KAJIAN RESEARCH SEBELUMNYA

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang membahas konflik yang terjadi di wilayah Togaten. Namun peneliti menemukan beberapa tulisan yang membahas tema tentang Salatiga dan persoalan sosialnya, antara lain:

- a. *Model Kerukunan antar Umat Beragama (Studi Kasus di Kota Salatiga, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang)* yang ditulis oleh Dr. Rahmat Hariyadi

(STAIN Salatiga). Penelitian ini fokus pada potret lokasi Salatiga, Magelang dan Semarang yang memperlihatkan eksistensi kampung muslim dan non muslim terkait beberapa kondisi yaitu: dialog antar agama yang masih mencari bentuk yang tepat untuk kasus-kasus Indonesia; kondisi empirik Indonesia yang plural; dan arus pluralisme sebagai tantangan serius bagi agama-agama dunia.

- b. *Potret Organisasi Keagamaan dan Respon Terhadap Dinamika Kehidupan Keberagamaan di Salatiga* oleh Beny Ridwan (STAIN Salatiga). Penelitian ini fokus pada masyarakat kota Salatiga sebagai *prototip* masyarakat plural baik secara etnis, agama, maupun budaya.
- c. *Pengaruh Interaksi Sosial Etnis Cina terhadap Transformasi Konflik di Salatiga* oleh M. Hussein Alwi (UKSW Salatiga). Penelitian ini fokus pada pengaruh interaksi sosial etnis Cina terhadap transformasi konflik di Salatiga.
- d. *Komunikasi antar Budaya* oleh Richard G Mayopu, (UKSW Salatiga). Penelitian ini fokus pada telaah

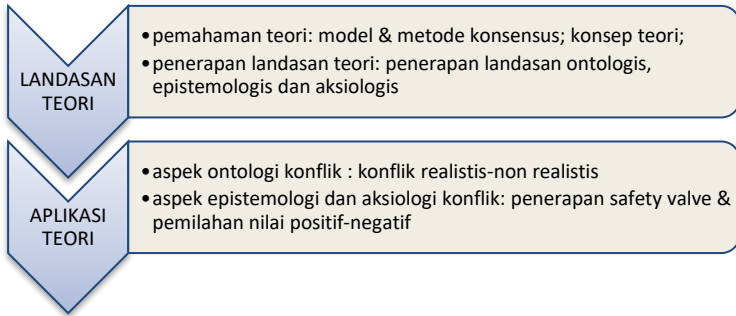
terhadap fenomena kemajemukan etnis di Salatiga dari sudut pandang komunikasi antarbudaya.

- e. *Menjalin Persobatan Lintas Iman di Aras Lokal* oleh Ambar Istiyani (*Reflection on Pluralism Advocacy*). Penelitian ini fokus pada solusi konflik pada tingkat akar rumput dan lokal dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai lembaga yang mereka miliki dengan mengutamakan pencegahan konflik (*conflict prevention*).

F. KERANGKA TEORI

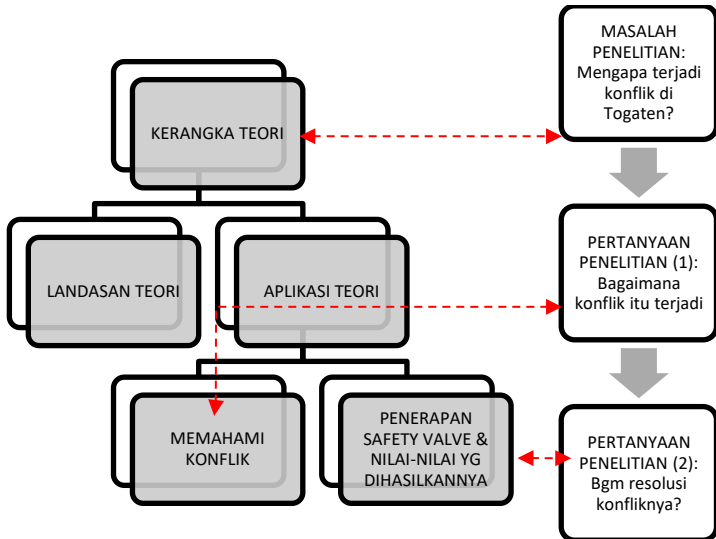
Penelitian ini merupakan penerapan metode penanganan konflik yang disebut *safety valve*, maka sistematika penulisannya adalah diawali “pendahuluan,” kemudian penjabaran singkat tentang “landasan teori,” kemudian tentang “aplikasi teori,” setelah itu diakhiri dengan “penutup.”

Penjabaran “landasan dan aplikasi teori” membutuhkan acuan kerangka teori agar pembahasan menjadi sistematis. Oleh karena itu peneliti mencoba menyusunnya dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka teori

Terkait masalah dan pertanyaan penelitian, maka korelasinya dengan kerangka teori adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Korelasi antara kerangka teori dengan masalah

dan pertanyaan penelitian
Jawaban masalah penelitian

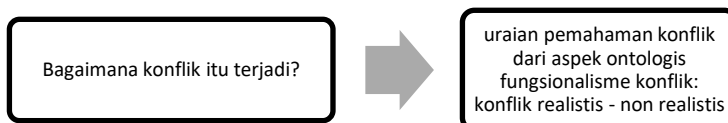
Jawaban dari masalah penelitian yang menanyakan: “Mengapa terjadi konflik di Togaten?” adalah kerangka teori yang memuat pembahasan landasan teori dan aplikasinya.



Gambar 4. Jawaban masalah penelitian

Jawaban pertanyaan penelitian pertama

Selanjutnya jawaban pertanyaan penelitian 1 tentang “Bagaimana konflik itu terjadi?” adalah uraian tentang pemahaman konflik dari aspek ontologis, yang terdiri dari pembahasan konflik realistik dan non realistik.

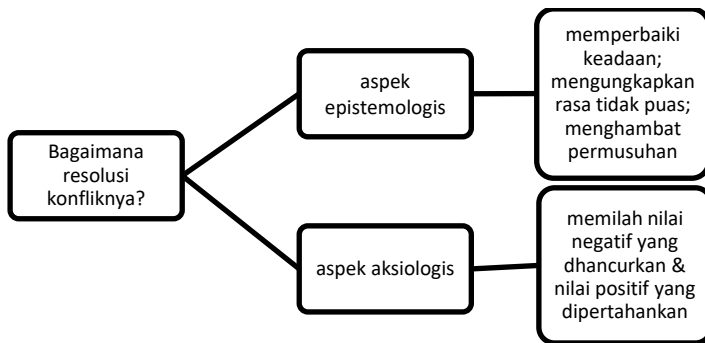


Gambar 5. Jawaban pertanyaan penelitian 1

Jawaban pertanyaan penelitian kedua

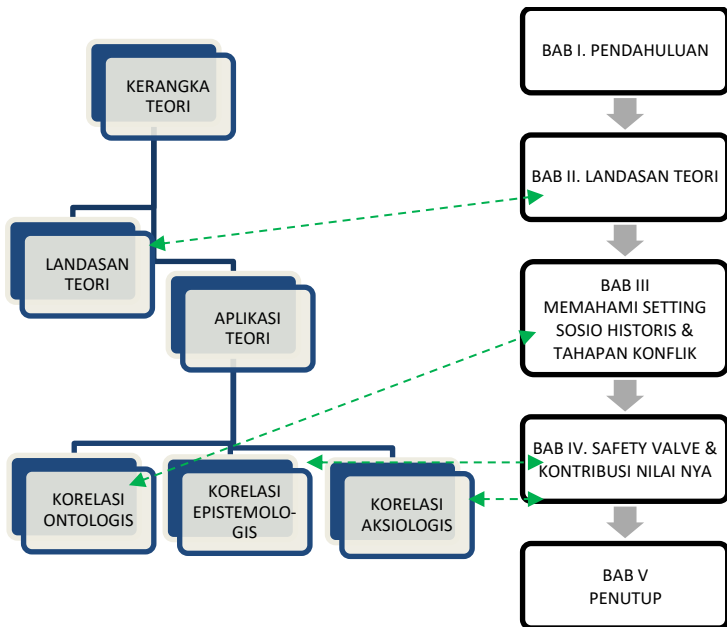
Jawaban atas pertanyaan penelitian 2 tentang “Bagaimana resolusi konfliknya?,” adalah uraian *safety valve*

sebagai resolusi konflik, yang terbagi menjadi 2 aspek yaitu epistemologi dan aksiologi. Pembahasan aspek epistemologis terkait penerapan metodologi *safety valve* untuk memperbaiki keadaan; mengungkapkan rasa tidak puas; dan menghambat permusuhan. Sedangkan pembahasan aspek aksiologis, terdiri dari pembahasan nilai negatif yang dihancurkan dan nilai positif yang dipertahankan.



Gambar 6. Jawaban pertanyaan penelitian 2

Terkait pembagian bab dan sub bab, maka kerangka teori adalah gambaran dari pembahasan bab kedua hingga keempat. Sementara dua bab yang lain yaitu bab pertama adalah pendahuluan dan bab kelima adalah penutup. Hal itu dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 7.
Korelasi antara kerangka teori dengan pembagian bab

Pada **bab pertama** diuraikan tentang “Pendahuluan” yang terdiri dari delapan sub bab yaitu: (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Pembatasan Masalah, (4) Signifikansi Penelitian, (5) Kajian Riset Sebelumnya, (6) Kerangka Teori, (7) Metode Penelitian dan (8) Instrumen Penelitian. Kemudian **bab kedua** tentang “Landasan Teori” yang terdiri dari dua sub bab yaitu: (1) Pemahaman Teori. (2) Penerapan Landasan Teori. Lalu **bab ketiga** tentang

“Memahami Setting Sosio Historis dan Tahapan Konflik.” Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu: (1) Setting Sosio Historis. (2) Tahapan Konflik. Selanjutnya, pada **bab keempat** akan diuraikan tentang “*Safety Valve* dan Kontribusi Nilainya.” Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu: (1) *Safety Valve* sebagai Resolusi Konflik. (2) Resolusi Konflik Realistis. (3) Resolusi Konflik Non Realistis. (4) Kontribusi Nilai *Safety Valve*. Dan yang terakhir adalah **bab keenam** yaitu “Penutup” yang berisi (1) Kesimpulan dan (2) Saran.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Berbeda dengan metode lain yang umumnya memiliki acuan utama pada metode, maka studi kasus bukanlah suatu pilihan metodologis, melainkan lebih sebagai pilihan objek penelitian yang dapat dikaji dengan banyak cara, ada yang memanfaatkan proposisi teoretis dengan menggunakan bukti kualitatif maupun kuantitatif atau kombinasi keduanya (Stake, hal. 299). Tulisan ini cenderung menggunakan kombinasi keduanya.

Selanjutnya, karena studi kasus dapat dikaji dengan banyak cara, maka menurut Yin (2008:1), definisinya pun bervariasi, antara lain:

- a. sebagai metode penelitian dalam ilmu sosial yang dilakukan dengan pemeriksaan longitudinal terhadap suatu kasus dengan cara yang sistematis dalam pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Hasilnya adalah pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.
- b. sebagai suatu strategi riset, yaitu telaah empiris yang menyelidiki gejala dalam latar kehidupan nyata, bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dengan bukti kuantitatif maupun kualitatif.
- c. sebagai metode penelitian yang mempunyai unsur utama *how* dan *why*, meneliti masalah-masalah kontemporer serta sedikitnya peluang peneliti dalam mengontrol peritiswa (kasus) yang ditelitinya.

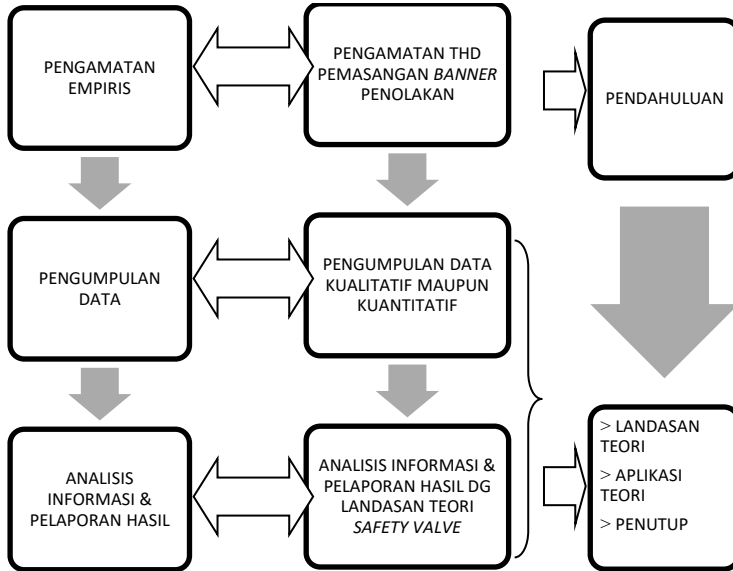
Definisi yang pertama fokus pada cara yang sistematis dan hasil yang mendalam; yang kedua fokus pada penggunaan bukti kualitatif maupun kuantitatif; dan yang ketiga fokus pada unsur *how* dan *why* serta penekanan minimnya peluang intervensi.

Dari 3 definisi tersebut, maka dapat disimpulkan tentang definisi studi kasus yang bermakna luas, yaitu sebagai metode penelitian dalam ilmu sosial yang sistematis dari aspek:

- a. pengamatan, khususnya pengamatan empiris tentang gejala dalam latar kehidupan nyata bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya;
- b. pengumpulan data, dengan bukti (proposisi teoritis) kuantitatif maupun kualitatif;
- c. analisis informasi dan pelaporan hasil dengan pemahaman *why & how* tentang persoalan yang diambil, *why* tentang mengapa sesuatu itu terjadi (UJI HIPOTESIS) dan menjadikannya sebagai dasar bagi riset selanjutnya (HIPOTESIS) (Schramm, dalam Yin, 1981).

Dalam konteks ini, peneliti memilih menggunakan definisi studi kasus yang bermakna luas karena penelitian ini tidak hanya fokus pada cara yang sistematis dan hasil yang mendalam saja; namun juga memberi perhatian pada penggunaan bukti kualitatif maupun kuantitatif; serta melakukan analisis informasi dan pelaporan hasil dengan pemahaman *why & how*. Korelasi antara definisi studi kasus

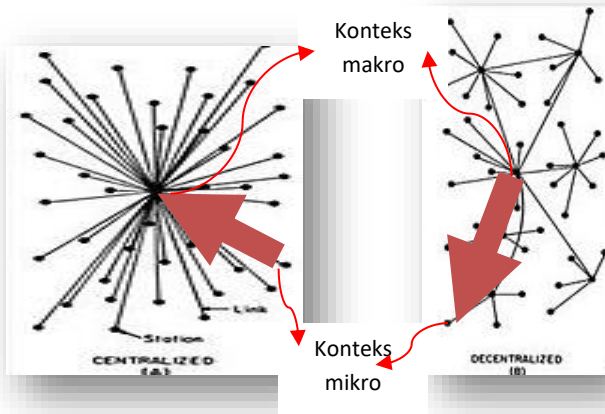
tersebut dengan penelitian konflik di Togaten dan sekitarnya serta pembagian bab dalam pelaporan hasil adalah:



Gambar 8. Korelasi definisi studi kasus dengan laporan penelitian

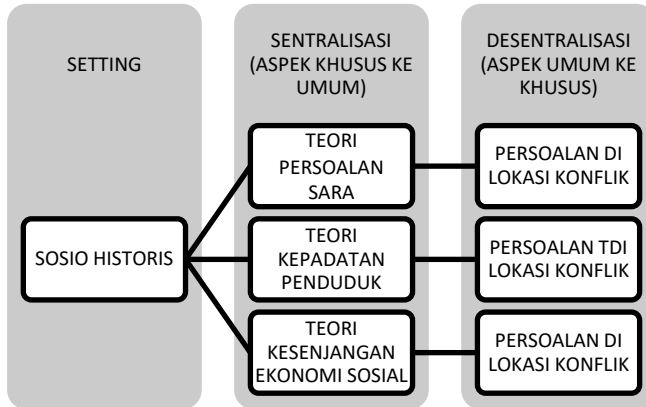
Pada saat melakukan pengamatan empiris, persoalan yang muncul ternyata tidak hanya terkait dengan eksistensi masyarakat Togaten saja, namun juga masyarakat Salatiga secara umum bahkan persoalan teori konflik secara global. Untuk itu, peneliti membutuhkan metode induktif-deduktif yang menghasilkan pemahaman sentralisasi dan desentralisasi.

Sentralisasi yaitu pemahaman dengan teknik induktif dari daerah (khusus) ke pusat (umum). Adapun desentralisasi adalah penerapan teori yang bersifat umum disesuaikan dengan karakteristik khusus. Dengan adanya desentralisasi akan ditunjukkan bahwa karakter wilayah berpengaruh besar terhadap munculnya konflik tertentu.



Gambar 9. Perbandingan Sentralisasi dan Desentralisasi
(Sumber: Wikipedia)

Jika teknik pemaparan yang digunakan dalam sentralisasi adalah teknik induktif, maka dalam desentralisasi adalah sebaliknya, yaitu teknik deduktif dari umum (konteks makro) ke khusus (konteks mikro).



Gambar 10. Sentralisasi dan desentralisasi dalam setting sosio historis

H. INSTRUMEN PENELITIAN

Sebagai bagian dari penelitian gabungan (kualitatif dan kuantitatif), maka sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong, 2009: 157, 159, 160) sebagai berikut:

- a. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui video/ audio tape, foto atau film;

- b. Sumber tertulis, antara lain berupa buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi;
- c. Foto, yang dimaksud adalah foto yang menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.
- d. Data statistik, fungsinya hanya sebagai sumber tambahan jika diperlukan. Misalnya mengenai pertambahan atau pengurangan penganut agama tertentu dari tahun ke tahun. Atau pertumbuhan ekonomi di wilayah yang diteliti.

BAB II. LANDASAN TEORI

A. PEMAHAMAN TEORI

1. Model Konsensus/ Resolusi Konflik

Secara umum, ilmu terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu *social science*, *natural science* dan *humaniora*. Kajian *social science* terdiri dari struktur sosial, perubahan sosial, perilaku sosial, dinamika sosial, diferensiasi sosial dan rekayasa sosial. Kajian tentang konflik merupakan bagian dari kajian perubahan sosial.

Karl Marx menyatakan bahwa konflik bukanlah “penyakit” melainkan hal yang wajar karena sebagai bagian dari “hakikat kenyataan sosial” (Dahrendorf dalam Raho, 2007: 77). Lalu, pengagas teori dialektika Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa di mana ada konflik maka di situ ada konsensusnya, karena kita tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Sebaliknya, konflik pun

bisa menghantar orang kepada konsensus (Raho, 2007: 77). Terkait pembahasan konsensus tersebut, Gunaryo (2007: 39) menjelaskan tentang beberapa model pendekatan konflik, yaitu: pendekatan ketahanan sosial (*social resilience*); pendekatan kesejahteraan (*social prosperity*); pendekatan keamanan (*security*); pendekatan asimilatif; pendekatan pembagian kekuasaan (*power sharing*); dan pendekatan hukum. Masing-masing pendekatan mempengaruhi pemahaman dan analisa seseorang terhadap konflik. Jadi pendekatan di sini tidak hanya untuk mengerti tetapi juga untuk menyelesaikan konflik, khususnya konflik yang berpotensi membawa daya rusak bagi kehidupan manusia, seperti konflik kekerasan (*violent conflict*).

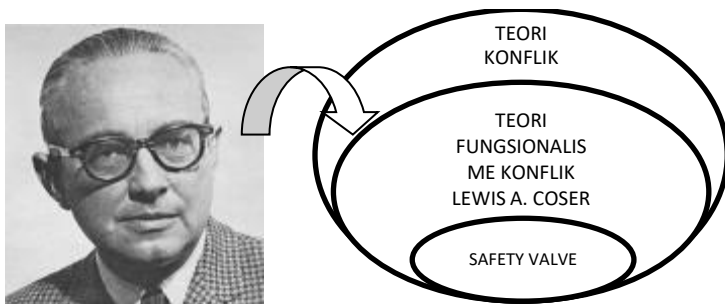
Penelitian ini menggunakan pendekatan ketahanan sosial yang didefinisikan sebagai berikut:

Seringkali konflik terjadi akibat dari isu-isu yang tak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Isu-isu demikian sering menimbulkan kejengkelan, rasa saling mencurigai, ketidakpuasan, atau dalam istilah Inggris disebut dengan istilah *grievances*. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat melalui proses-proses pembelajaran maupun pemberdayaan. Penguatan *civil society* merupakan kunci dalam hal ini. Pendekatan ketahanan sosial mengindikasikan bahwa pemahaman dan analisa konflik mengarah pada asumsi bahwa masyarakat tidak

mudah termakan isu-isu yang belum jelas. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa dalam masyarakat ada kemampuan internal untuk mengatasi (potensi) konflik maupun perselisihan (Gunaryo, 2007: 39).

2. Metode Konsensus/ Resolusi

Metode konsensus/ resolusi tulisan ini adalah *safety valve* (katup penyelamatan). Metode ini adalah salah satu bagian dari teori fungsionalisme konflik yang diperkenalkan oleh seorang sosiolog asal Berlin, Jerman, Lewis Alfred Coser (1913-2003). Dan teori fungsionalisme konflik sendiri adalah bagian dari rumpun teori konflik.



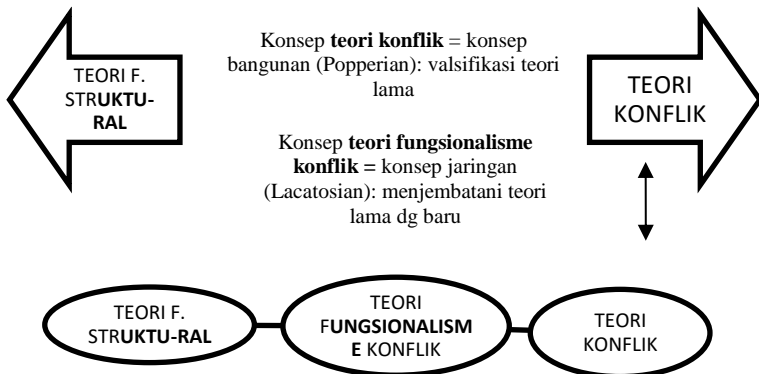
Gambar 11.
Lewis A. Coser dan bagan tentang metode *safety valve*

Menurut teori konflik, konflik tidak bisa dilenyapkan, tetapi hanya bisa dikendalikan, supaya konflik latent tidak menjadi manifest dalam bentuk kekerasan (*violence*). Bentuk pengendalian konflik tersebut yaitu: **Pertama**, konsiliasi (*conciliation*) yaitu cara damai yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga-lembaga berfungsi efektif jika: (a) bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan tanpa campur tangan pihak lain; (b) kedudukan lembaga tersebut dalam masyarakat bersifat monopolistis (hanya lembaga tersebut yang berfungsi demikian); (c) peran lembaga harus mampu mengikat kelompok kepentingan yang berlawanan. Termasuk keputusan-keputusan yang di hasilkan; dan (d) bersifat demokratis. Selain itu, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi kelompok sebelum melakukan koalisi yaitu: (a) masing-masing kelompok sadar sedang berkonflik; (b) kelompok-kelompok yang berkonflik terorganisir secara jelas; dan (c) setiap kelompok yang berkonflik harus patuh pada *rule of the games*. **Kedua**, mediasi (*mediation*) yaitu kesepakatan pihak yang berkonflik dalam menunjuk pihak ketiga untuk memberi “nasehat-nasehat” penyelesaian konflik. Tujuannya

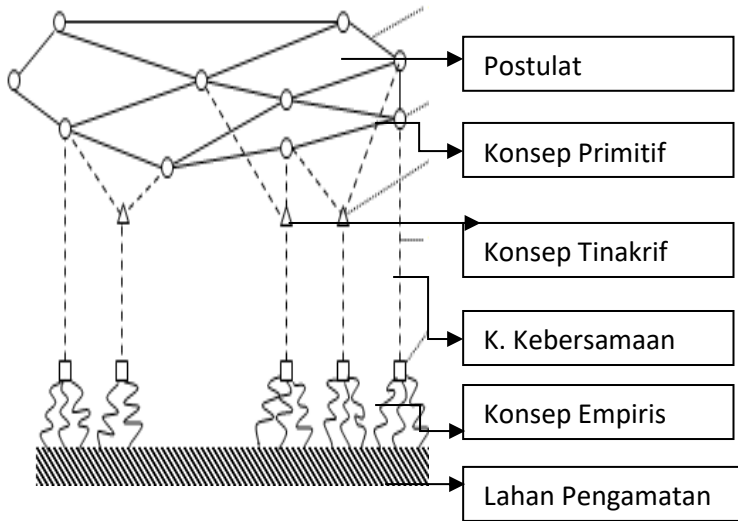
adalah mengurangi irrasionalitas pihak yang berkonflik. **Ketiga**, perwasitan (*arbitration*) yaitu kesepakatan pihak yang bersengketa untuk menerima atau “terpaksa” menerima “keputusan-keputusan” tertentu untuk mengurangi konflik pihak ketiga yang akan memberikan resolusi.

3. Konsep Teori

Secara umum, teori konflik membangun teorinya dengan konsep bangunan (Popperian) sehingga kehadirannya memvalidasi (menghapus) teori fungsionalisme struktural. Namun tidak demikian dengan fungsionalisme konflik, karena Coser membangun teorinya dengan konsep jaringan (Lacatosian) yang justru berusaha menjembatani teori baru dengan lama sebagai dua teori yang saling berhubungan.



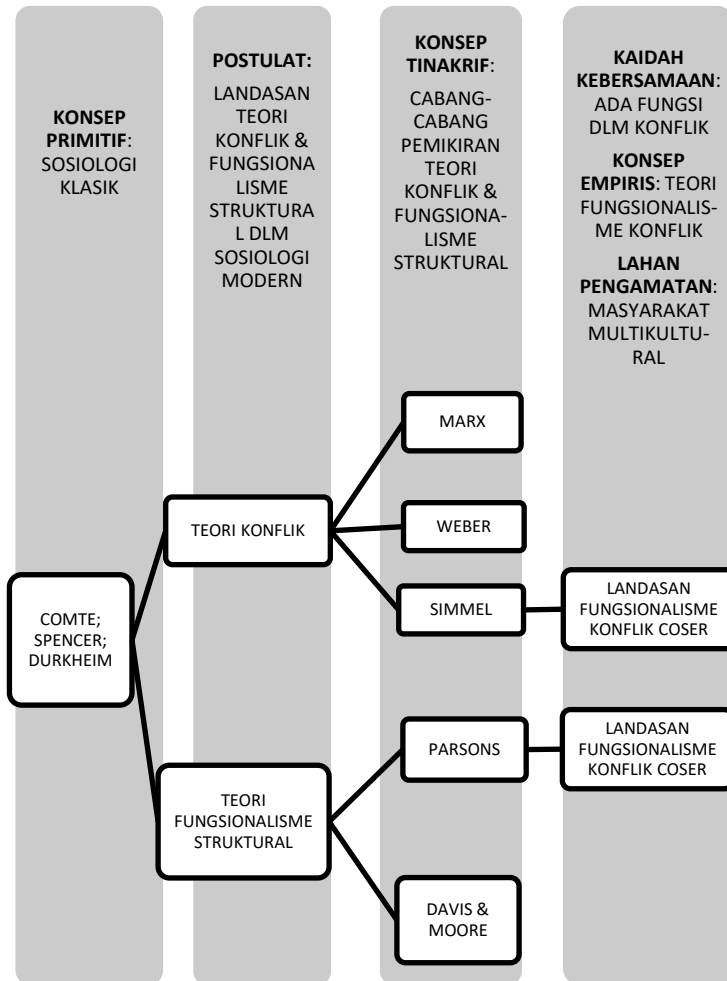
Gambar 12. Perbedaan konsep teori pada teori fungsionalisme konflik dan teori konflik
 Selengkapnya, kronologi konsep teori jaringan dapat dipahami dari bagan Herbert Feigi sebagai berikut:



Gambar 13. Bagan jaringan teori fungsionalisme konflik dengan model gambar Herbert Feigi (Liek Wilardjo, 2011)

a. Lahan Pengamatan

Dalam teori jaringan dalam fungsionalisme konflik, lahan pengamatan bagi Coser adalah masyarakat di Eropa yang multikultural dan telah mengalami berbagai perubahan sosial. Selanjutnya, jika bagan jaringan diterapkan pada teori tersebut, maka dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 14.
Bagan konsep jaringan teori fungsionalisme konflik

b. Konsep Empiris

Konsep empiris penelitian ini adalah *safety valve* sebagai bagian dari teori fungsionalisme konflik yang dibahas Coser dalam karyanya *The Functions of Social Conflict*. Hal itu meliputi beberapa proposisi, yaitu:

- Fungsi-fungsi konflik sosial;
- *Safety valve*;
- Konflik realistik & non-realistik;
- Permusuhan dalam hubungan sosial yang erat;
- Isu fungsionalitas konflik;
- Kondisi konflik antara *in-group* dengan *out group*;

c. Kaidah Kebersamaan

Konsep empiris fungsionalisme konflik disusun berdasarkan kaidah kebersamaan antara konsep tinakrif I _yaitu rumpun teori fungsionalisme struktural, terutama dari Parsons _dengan konsep tinakrif II _yaitu rumpun teori konflik, terutama dari Simmel. Penyusunan tersebut, merupakan hasil dari penggabungan perhatian Coser terhadap kebijakan sosial dan politik di wilayah Eropa dan Amerika. Sebab setelah Perang Dunia ke II, ia mengajar di Universitas Chicago dan Brandeis serta mendapat gelar Ph.D dari Universitas Columbia, Amerika.

d. Konsep Tinakrif I

Selama lebih dari 20 tahun Coser mendukung pemikiran teori fungsional. Di antara teori fungsional yang banyak berpengaruh terhadap Coser adalah fungsionalisme struktural, terutama dari Talcot Parsons, sebab istilah struktural dan fungsional dalam teori tersebut benar-benar saling berhubungan. Hal itu berbeda dengan fungsionalisme struktural K. Davis dan W. Moore karena meskipun teori struktur masyarakat (*societal functionalism*) yang mereka usung didominasi oleh pendekatan fungsionalisme struktural, namun teori tersebut tidak selalu menghubungkan fungsional dan struktural. Menurut mereka, struktur masyarakat dapat dipelajari tanpa perlu mengetahui fungsinya begitu juga sebaliknya, fungsi masyarakat pun dapat dipelajari tanpa mengetahui strukturnya.

Pandangan ini kemudian memunculkan teori stratifikasi struktural-fungsional. Tetapi teori itu kemudian bermasalah karena 3 alasan yaitu: posisi tertentu lebih menyenangkan daripada yang lain; posisi tertentu lebih penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat daripada yang lain; dan setiap posisi memiliki kualifikasi dan bakat yang berbeda. Posisi yang tinggi cenderung tidak diminati (karena

memerlukan bakat dan kemampuan terbaik) tetapi penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Pada keadaan ini masyarakat dianjurkan memberi **reward** kepada individu yang menempati posisi tersebut agar menjalankan fungsinya secara optimal. Permasalahan tersebut memunculkan 3 kritikan yaitu: Teori ini menolak sama sekali keberadaan masyarakat tanpa kelas; Teori ini melanggengkan orang yang pada keadaan awal telah memiliki kekuasaan, prestise dan uang; Posisi penting yang disebutkan dalam teori ini merupakan sesuatu yang relatif berbeda satu sama lain.

Akhirnya, Talcott Parsons pun memaparkan teori fungsionalisme struktural dengan memperkenalkan 4 fungsi penting semua sistem dan terkenal dengan istilah AGIL (*Adaptation, Goal Atteinment, Integration, Latency*).

- **Adaptation** yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Sistemnya disebut dengan organisme pelaku, yang terdiri dari *sistem kepribadian; sistem sosial; dan sistem kultural*.
- **Goal atteinment**, yaitu mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan. Sistemnya adalah sistem sosial, yaitu interaksi yang menggunakan aktor dari aspek peran dan status, bukan dari tindakan dan sudut pikiran. Agar berkelanjutan, sistem ini memunculkan persyaratan yaitu: (a) harus terstruktur dan mampu harmonis dengan sistem lain untuk menjaga keberlangsungan

hidupnya; (b) mendapat dukungan dari sistem lain; (c) mampu mengakomodasi para aktor secara proporsional; (d) mampu melahirkan partisipasi aktor yang memadai; (e) mampu untuk mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu; (f) dapat dikendalikan bila terjadi konflik yang menimbulkan kekacauan; (g) memiliki bahasa.

- **Integration**, yaitu mampu mensinergiskan antar komponen dalam sistem dengan ketiga fungsi yang lain (*Adaptation, Goal Atteinment, Latency*). Sistemnya adalah aktor dan sistem sosial. Meskipun keadaan ini dilihat dengan cara pandang sistem tetapi tidak mengabaikan interaksi antara aktor dengan sistem sosialnya. Pemeliharaan integrasi pola nilai dan norma ke dalam sistem dengan cara sosialisasi dan internalisasi. Pada proses sosialisasi yang sukses, nilai dan norma sistem sosial itu akan diinternalisasikan atau menjadi bagian kesadaran dari aktor tersebut. Akibatnya ketika si aktor mengejar kepentingannya maka ia juga sekaligus mengejar kepentingan sistem sosialnya. Proses sosialisasi ini berhubungan dengan pengalaman hidup (dan spesifik) dan harus berlangsung terus menerus, karena nilai dan norma yang diperoleh sewaktu kecil tidaklah cukup untuk menjawab tantangan ketika dewasa.
- **Latency** yaitu mampu memelihara dan mendialektikkan pola-pola kultural yang menopang dan menciptakan motivasi. Sistemnya adalah kultural sebagai kekuatan yang utama mengikat. Adapun kultur berfungsi menengahi interaksi antar aktor, menginteraksikan kepribadian dan menyatukan sistem sosial.

e. Konsep Tinakrif II

Landasan munculnya teori konflik antara lain karena persoalan kesenjangan sosial. Pemikiran tersebut lalu memunculkan asumsi dasar tentang konflik yang diyakini oleh Marx, Weber dan Simmel, bahwa: (a) Manusia memiliki sejumlah kepentingan dan berusaha mendapatkannya; (b) Kekuasaan sebagai pusat hubungan sosial, selain sebagai sumber konflik juga bersifat pemaksaan; serta (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandang sebagai senjata untuk mengejar kepentingan-kepentingan mereka. Asumsi tentang konflik pun berkembang. Masyarakat Jerman Inggris dan Perancis lebih didominasi pemikiran Marx (Marxian) karena teorinya tentang masyarakat tanpa kelas relevan dengan problem kesenjangan sosial borjuis dan proletar. Sementara wilayah lainnya cenderung didominasi pemikiran Weber. Adapun Coser cenderung pada pemikiran Simmel.

Pemikiran Marx

Pemikiran teori kelas Marx berangkat dari pemikiran filsafat dialektika Hegel. Hanya saja Marx mengganti dialektika ideal menjadi dialektika material, yang diambil dari filsafat Fuerbach, bahwa sejarah merupakan proses perubahan terus menerus secara material. Marx mengatakan bahwa:

Konflik yang paling menonjol disebabkan cara produksi barang-barang material. Sarana ini sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. *Borjuis* adalah kelompok pemilik modal (*capital*) dan penguasa sarana-sarana produksi. Jumlah mereka sedikit dan mereka menjual barang-barang hasil produksi dengan harga yang jauh lebih besar daripada biaya produksi sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan *proletariat* adalah kelompok pekerja yang jumlahnya jauh lebih besar. Mereka menyerahkan tenaganya untuk menjalankan alat-alat produksi dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan upah dan bukan barang yang mereka hasilkan. Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis, kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama ada kesadaran semu (*false consiousness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi. Ketegangan tersebut terjadi jika kaum proletar telah sadar akan eksploitasi kaum borjuis terhadap mereka. Stratifikasi sosial ini harus dihapus agar terjadi keseimbangan kesejahteraan antara borjuis dan proletar (Marx dalam Raho, 2007: 73).

Pemikiran Weber

Proposisi Weber merupakan bangunan antara superordinat dengan subordinat. Dikatakan bahwa:

- Konflik superordinat-subordinat mungkin terjadi karena tarikan otoritas politik.
- Tarikan tinggi otoritas politik dapat terjadi melalui keanggotaan kelas, kelompok status dan hierarki politik / derajat ketidaksetaraan distribusi sumber daya dengan hierarki sosial yang tinggi/ mobilisasi hierarki sosial atas dasar kekuasaan, *prestige* serta kekayaan.
- Konflik superordinat - subordinat dimungkinkan terjadi melalui kepemimpinan yang karismatik yang dapat memobilisasi subordinat atau super ordinat.
- Melalui kepemimpinan yang karismatik tersebut, konflik berhasil dicapai dengan tekanan yang kuat terhadap otoritas yang lama sehingga menghasilkan sistem baru perihal peran dan administrasi. Sebuah sistem dengan otoritas peran dan administrasi yang terbentuk tersebut, kembali terjadi tarikan yang terus berulang (kembali ke proposisi 2 dst).

Pemikiran Simmel

Pandangan Simmel tentang teori konflik berbeda dengan Marx maupun Weber. Jika keduanya menjadikan dimensi masyarakat sebagai unit analisisnya, maka Simmel menekankan proses interaksi sosial di tingkat mikro. Ia tidak lagi fokus pada persoalan kesenjangan antar kelompok melainkan pada interaksinya. Pemikiran ini lebih humanis, karena membicarakan kesenjangan cenderung mengarahkan pemikiran pada hal negatif (*negative thinking*), sementara solusi yang dibutuhkan adalah positif (*positive thinking*).

Menurut Simmel, salah satu tugas utama sosiologi adalah memahami interaksi antar individu yang dapat melahirkan konflik maupun solidaritas. Konflik adalah variabel yang menampilkan derajat intensitas interaksi. Karena itu kompetisi dan pertarungan merupakan ujung ekstrim dari kontinum interaksi sosial. Kompetisi menyertakan usaha keras pihak yang terlibat dalam cara yang teratur dan paralel demi tujuan eksklusif. Pertarungan lebih pada pertikaian tanpa aturan satu sama lain.

Berkaitan dengan konflik sosial, Simmel mengembangkan tiga perangkat proposisi tentang:

- Intensitas konflik: “Semakin tinggi derajat emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah kekerasan.”
- Fungsi konflik bagi pihak yang terlibat: “Semakin konflik membentuk kekerasan maka semakin meningkat derajat solidaritas internal tiap kelompok.”
- Fungsi konflik bagi sistem keseluruhan: (a) Semakin rendah derajat kekerasan suatu konflik maka semakin besar kemungkinan konflik tersebut mengarahkan pada integrasi keseluruhan sistem; (b) Semakin tinggi derajat kekerasan dan makin lama suatu konflik antar kelompok terjadi, maka semakin mungkin terjadi koalisi di antara berbagai kelompok yang sebelumnya tidak terkait dalam suatu sistem; (c) Semakin lama ancaman konflik kekerasan antar kelompok berlangsung, maka semakin bertahan koalisi masing-masing yang terlibat konflik.

Jika Marx berhipotesis bahwa pada akhirnya konflik yang keras mengakibatkan perubahan sosial, maka menurut Simmel bahwa konflik justru mengarahkan pada penurunan ketegangan dan munculnya stabilitas sistem sosial. Karena itu konflik sosial seolah-olah sudah dirancang untuk memecahkan dilema dualisme. Konflik merupakan suatu cara untuk mencapai kesatuan, walaupun mungkin dicapai dengan cara menghilangkan salah satu dari pihak yang bertikai. Konflik sosial diibaratkan sebagai gejala-gejala penyakit yang sebenarnya telah menunjukkan terjadinya usaha dari organisme sosial untuk membebaskan diri dari gangguan dan kehancuran yang disebabkan oleh penyakit tersebut.

Pemikiran Coser dan Dahrendorf

Berbeda dengan para pendukung teori konflik yang umumnya mengembangkan teori Marx dan Weber, tidak demikian dengan Coser, karena ia cenderung mengembangkan pemikiran Simmel. Perbedaan ini dapat dilihat dalam perbandingan pemikirannya dengan Ralf Dahrendorf yang cenderung Marxian.

Mula-mula Dahrendorf melihat teori konflik sebagai teori parsial yang dapat dipakai sebagai perspektif untuk menganalisa fenomena sosial. Masyarakat dianggap bersisi

ganda, yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Akhirnya mereka pun berbeda dengan teori konflik yang umumnya menolak fungsionalisme struktural sepenuhnya. Teori konflik Dahrendorf (1959: 176) disebut juga teori konflik dialektika karena memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai perubahan, melainkan akibat konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa:

- Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Unsur-unsur yang bertentangan dalam masyarakat akibat pembagian otoritas yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya “perubahan sosial.”
- Konflik adalah gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Menurut Dahrendorf, sistem tidak selamanya terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Jadi ada atau tidaknya konflik dalam masyarakat, tidak mempengaruhi perjalanan sistem, karena kepentingan anggota masyarakat sudah terwakili melalui mekanisme yang sudah terlembaga sehingga menghasilkan kompromi-kompromi baru yang diterima. Pelembagaan itu melibatkan kelompok-kelompok terkoordinasi (*imperatively coordinated association/ ICA*).
- Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan terhadap terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.

- Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain (Dahrendorf, 1959: 176).

Dahrendorf membangun teorinya dengan separuh penerimaan dan separuh penolakan terhadap fungsionalisme structural serta memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Perbedaannya dengan Coser adalah bahwa ia tidak menggunakan sama sekali teori Simmel. **Bentuk penolakan** Dahrendorf tercermin dari pandangannya bahwa pemilik sarana tidak selalu bertugas sebagai pengontrol, apalagi pada abad ke-19. Ia menunjukkan bentuk penolakan tersebut dengan memaparkan perubahan masyarakat industri:

- Dekomposisi modal. Contoh: timbulnya korporasi dengan saham yang dimiliki oleh orang banyak, di mana tak seorangpun memiliki kontrol penuh.
- Dekomposisi tenaga kerja. Sejak abad 19 mungkin sekali seorang atau beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya, seperti halnya mereka yang mempunyai perusahaan tapi tidak mengendalikannya. Karena zaman ini adalah zaman keahlian dan spesialisasi, manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai untuk memimpin perusahaannya agar berkembang dengan baik.
- Timbulnya kelas menengah baru. Pada akhir abad 19, lahir kelas pekerja dengan susunan buruh terampil di jenjang dan buruh biasa di bawah. Buruh terampil inilah yang muncul sebagai kelas menengah baru (Dahrendorf, 1959: 176).

Kemudian **bentuk penerimaannya** terlihat dari sikapnya yang mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Adapun dari Karl Marx, Dahrendorf mengadopsi ide tentang pertentangan kelas dan perubahan sosial sehingga muncul pandangannya tentang sisi ganda masyarakat, yaitu sisi konflik dan sisi kerja sama. Hal itu terjadi karena masyarakat atau sistem sosial dalam keadaan dinamis dan memiliki potensi konflik serta disintegrasi. Keteraturan dalam masyarakat terjadi karena adanya paksaan. Tiap posisi sosial memiliki otoritas tersendiri yang bukan ditentukan oleh individu, melainkan oleh posisi yang disandang individu. Ide ini kemudian **dimodifikasi** Dahrendorf berdasarkan perkembangan yang terjadi pada masanya. Ia berpendapat bahwa ada dasar baru pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan sarana produksi yang menjadi dasar perbedaan kelas itu yaitu kekuasaan (*power*) dan otoritas (*authority*). Keduanya merupakan sumber yang langka dan selalu diperebutkan dalam sebuah *imperatively coordinated associations* (ICA) atau pelebagaan kelompok-kelompok terkoordinasi. Masing-masing kelompok menempati posisi sebagai sub dominator (*subjugated group*) sedangkan

ICA menempati fungsi sebagai dominator (*dominated group*) karena terbentuk atas hubungan kekuasaan antara beberapa kelompok pemeran kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Adapun aturan mainnya adalah:

- Pada dasarnya tetap terdapat dua kelas sosial yaitu, mereka **yang berkuasa** (*ruling*) dan **yang dikuasai** (*ruled*), yang berkuasa berusaha mempertahankan STATUS QUO, yang dikuasai berusaha mendapatkan STATUS QUO.
- Kekuasaan menunjukkan adanya faktor “PAKSAAN” oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.
- Dalam ICA hubungan kekuasaan menjadi “tersahkan” atau **terlegitimasi**;
Konflik akan lebih berbahaya jika muncul dari kemiskinan relatif (merasa miskin) bukan kemiskinan dalam arti nyata (yang bisa dihitung dengan statistik), karena hal ini akan mengakibatkan perubahan struktural yang besar.

Mengapa Coser tidak cenderung pada pemikiran Marx sebagaimana Dahrendorf? Karena setelah teori masyarakat tanpa kelas dari Marx populer, ranah borjuis pun mengalami kemunduran diiringi kemunduran ranah publik secara umum. Sebab abad 20 adalah masa kebangkitan kapitalisme negara dan

pemerintah yang kemudian mengambil alih ruang publik, di mana warga hanya diberi kepuasan menjadi konsumen. Selain itu, pertumbuhan media massa komersial juga mengubah publik menjadi konsumen pasif, sehingga publik seolah tenggelam dalam isu-isu yang menyangkut kebaikan bersama dan partisipasi demokrasi. Oleh karena itu persoalan yang terjadi saat itu tidak sepenuhnya bisa difahami dengan pemikiran Marx atau Weber. Akhirnya, Coser pun cenderung mengembangkan pemikiran Simmel, sebagaimana disampaikan dalam buku *The Function of Social Conflict*.

Seperti halnya Simmel, Coser tidak mencoba menghasilkan teori yang mencakup seluruh fenomena sosial karena meyakini bahwa usaha menghasilkan teori yang mencakup seluruh fenomena sosial adalah *premature* (sesuatu yang sia-sia). Mereka juga tidak pernah menghasilkan risalat sebesar Durkheim, Weber atau Marx. Namun, mereka mempertahankan pendapat bahwa sosiologi bekerja untuk menyempurnakan konsep di mana isi dunia empiris dapat ditempatkan.

Ada beberapa proposisi yang dikutip Coser dari Simmel yang kemudian dikembangkan menjadi penjelasan-penjelasan tentang konflik yang menarik. Tidak jarang ia juga

mengkritisi pandangan Simmel dengan cara membandingkan dengan gagasan sosiolog-sosiolog klasik. Ia memilih untuk menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif, yaitu membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Lalu ia menambahkan dengan gagasan ahli psikologi ternama, seperti Sigmund Freud (1856-1939). Misalnya, Simmel memandang bahwa pertikaian/konflik adalah gejala yang tidak mungkin dihindari/ tunduk pada perubahan karena struktur sosial adalah gejala yang mencakup pelbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisahkan. Coser pun mengembangkan proposisi tersebut dan memperluasnya. Menurutnya, jika hal itu terjadi dalam kondisi positif maka akan membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat, sebab konflik bisa menjadi:

- a. proses instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial;
- b. alat untuk menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok; dan
- c. alat penguat identitas kelompok dan pelindung agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Misalnya, perang yang terjadi bertahun-tahun yang terjadi di Timur Tengah telah memperkuat identitas kelompok Negara Arab dan Israel (1956: 41). Ia melihat bahwa katup penyelamat dapat berfungsi sebagai jalan ke luar yang meredakan permusuhan, yang tanpa itu hubungan-hubungan di antara fihak-fihak yang bertentangan akan semakin menajam.

Inilah kelebihan Coser yang sangat disiplin dalam satu tema. Ia benar-benar *concern* pada pada tema-tema konflik, baik konflik ditingkatan eksternal, maupun internal. Ia mampu mengurai konflik dari sisi luar sampai sisi dalam. Bahkan mampu mengintegrasikan fungsionalisme dengan konflik hingga lahirlah “**konsep empiris**” yang disebut teori fungsionalisme konflik. Georger Ritzer menyatakan bahwa dengan melakukan kombinasi itu, baik teori fungsionalisme maupun teori konflik menjadi terlihat lebih kuat daripada berdiri sendiri (Bernard, 2007).

f. Postulat dan konsep primitif

Adanya kaidah kebersamaan antar konsep tinakrif menunjukkan bahwa konsep tersebut berakar dari **postulat** (landasan teori) yang disusun berdasarkan **konsep primitif**

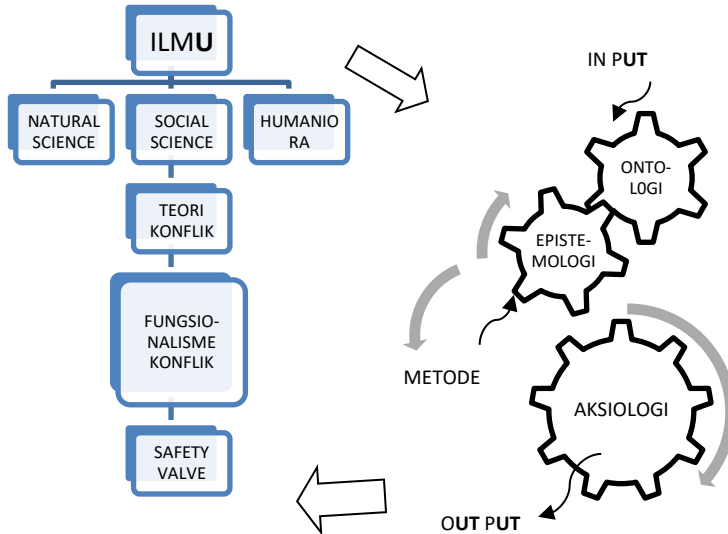
yang sama. Hal itu dapat ditelusuri dari masa sebelum tahun 1700 an, saat ranah publik mendominasi tatanan sosial masyarakat Eropa, sehingga konsep masyarakat idealnya adalah yang memiliki sistem teratur. Oleh karena itu Comte (1798-1857) memaparkan tentang analogi organismik, lalu Spencer (1820-1903) membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga berkembang menjadi *requisite functionalism*. Berdasarkan pemikiran keduanya, Durkheim (1858-1917) lalu menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan yang memiliki beberapa bagian berbeda namun saling interdependensi satu sama lain dan fungsional. Jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem (Bernard, 2007). Dari sinilah muncul teori fungsionalisme struktural.

Setelah terjadi revolusi industri hingga penghujung abad 19, terjadilah perubahan sosial dari dominasi ranah publik menjadi **ranah borjuis**. Saat ini terasa bahwa teori fungsional sering mengabaikan analisa konflik karena konflik dilihat sebagai penyakit bagi kelompok sosial. Coser lalu turut dalam **kelompok ilmuwan pembangun teori konflik** yang menganalisa konflik agar mendapatkan cukup perhatian.

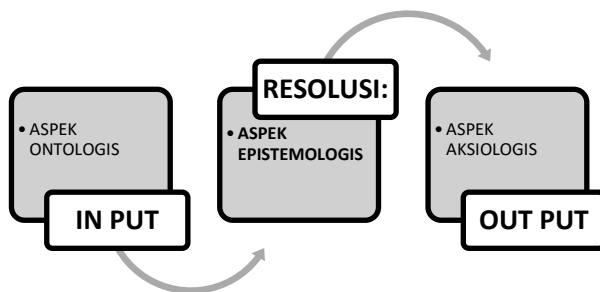
B. PENERAPAN LANDASAN TEORI

Sebagai bagian dari teori yang menggunakan konsep jaringan, maka konsensus *safety valve* bersifat holistik. Namun tanpa penyederhanaan sistematikanya, penerapan teori tersebut agak sulit difahami. Untuk itu, peneliti memilah obyek permasalahan menjadi 3 bagian sesuai landasan keilmuan filsafat ilmu. Sebab, teori ilmu apapun, baik *natural science*, *social science* maupun humaniora dapat dipahami dengan filsafat ilmu, demikian juga *safety valve* yang muncul dari ranah *social science*. Pemahaman itu meliputi:

- a. Pemahaman landasan ontologi (diajukan dengan pertanyaan “apa”) yang akan menyoroti pemahaman konfliknya (*in put*);
- b. Pemahaman landasan epistemologi (diajukan dengan pertanyaan “bagaimana”) yang akan menyoroti penerapan metodenya; serta
- c. Pemahaman landasan aksiologi (diajukan dengan pertanyaan “untuk apa”) yang akan menyoroti hasil penerapan metode tersebut (*out put*).



Gambar 15. Pembagian ilmu menurut filsafat ilmu & korelasinya dengan fungsionalisme konflik

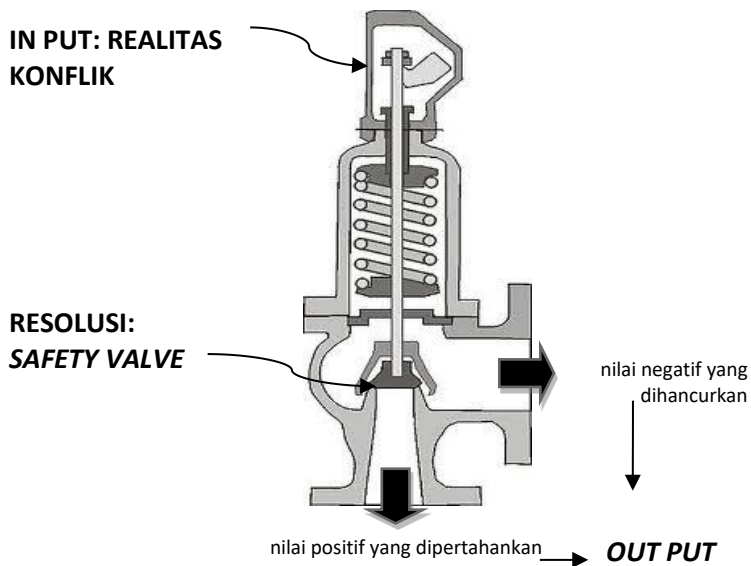


Gambar 16. Tahap penerapan teori sesuai landasan keilmuan

Selain perlu disederhanakan, teori tersebut juga perlu disesuaikan dengan setting sosio historisnya supaya tepat guna, lalu diproses dalam “mesin” fungsionalisme konflik dengan imajinasi sebagai berikut:

- a. Landasan ontologi berupa tinjauan konflik dari aspek realitas (proposisi Coser ketiga) adalah ibarat “biji” yang menjadi *in put* konfliknya.
- b. Landasan epistemologi berupa metodologi resolusi konflik *safety valve* (proposisi Coser kedua) adalah “elemen mesin” yang “memisahkan biji dari kulitnya.”
- c. Landasan aksiologinya berupa nilai-nilai yang dihasilkan metode resolusi konflik adalah “biji” dan “kulit” yang telah terpisah sebagai *out put* resolusi konfliknya. Nilai-nilai itu terdiri dari “biji” sebagai nilai positif (struktur yang dipertahankan) dan “kulit beras” sebagai nilai negatif (struktur yang dihancurkan).

Penjelasan ketiga landasan tersebut didukung oleh fungsi-fungsi konflik sosial (proposisi 1); permusuhan dalam hubungan sosial yang erat (proposisi 4); isu fungsionalitas konflik (proposisi 5) serta tentang kondisi konflik antara *in group* dan *out group* (proposisi 6).

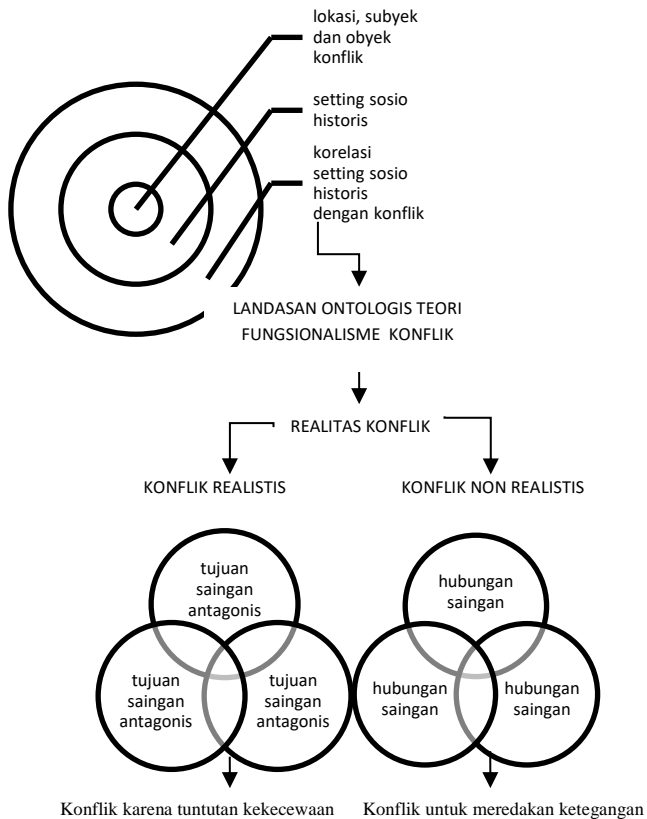


Gambar 17.
Korelasi landasan filsafat ilmu dan teori fungsionalisme konflik

1. Penerapan Landasan Ontologis

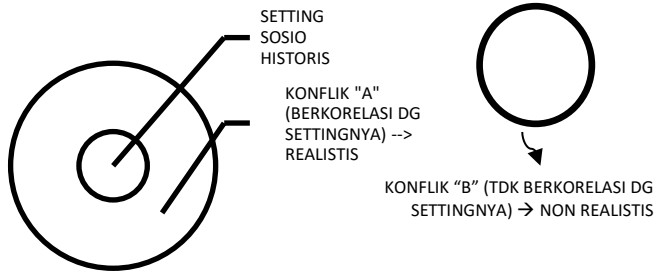
“Fenomena” pada “variabel tetap” dapat diidentifikasi sebagai “konflik” oleh “variabel bebas” karena ada “penjelasan teori” tentang korelasi keduanya pada “variabel antara.” Dalam konteks pemahaman ontologis teori fungsionalisme konflik, penjelasan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan “seperti apa” konflik yang terjadi? “Apakah” realistik atau non realistik?

Pemahaman realitas konflik membutuhkan “peta” untuk memahami wilayah asing yang tidak pernah dipikirkan, namun tiba-tiba ingin diketahui (William Hendricks, 2008: vii). Peta tersebut akan menjelaskan tentang korelasi setting sosio historis dengan konflik yang ada.



Gambar 18. Proses identifikasi realitas konflik

Berdasarkan pemahaman dengan bagan tersebut, muncul asumsi bahwa realitas konflik memiliki korelasi dengan setting sosio historisnya. Misalnya munculnya istilah antagonis/ protagonis, hal itu menunjukkan adanya fenomena yang “berlawanan” dengan kondisi sosio historis yang ada. Dengan demikian pemahaman realitas konflik ini sekaligus sebagai bentuk pemahaman setting sosio historis terkait. Atau dengan kata lain definisi realistis atau non realistis juga tergantung dari korelasinya dengan setting sosio historis. Ketika “tuntutan kekecewaan protagonis” terhadap “tujuan antagonis” berkorelasi dengan setting sosio historisnya, maka konflik tersebut adalah konflik realistis. Sebaliknya, jika yang ditemukan adalah “hubungan saingan” semata yang tidak berkorelasi dengan setting sosio historisnya, maka dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi adalah konflik non realistis. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 19. Landasan ontologi konflik: realistis-non realistis

a. **Konflik Realistis**

Menurut Coser, konflik dapat dikatakan realistis jika berasal dari tuntutan kepada pihak yang dianggap mengecewakan sebagai tujuan saingan antagonis (Coser dalam Rubin, 2004). Secara sepintas istilah antagonis-protagonis memang bermakna derogatif atau sudut pandang salah satu pihak saja. Namun bagi Coser hal itu hanya sebagai identifikasi adanya yang kecewa dan mengecewakan saja, berdasarkan asumsi bahwa kehidupan sosial itu seperti panggung drama dan manusia sebagai aktor yang melakukan peran masing-masing.

b. **Konflik Non Realistis**

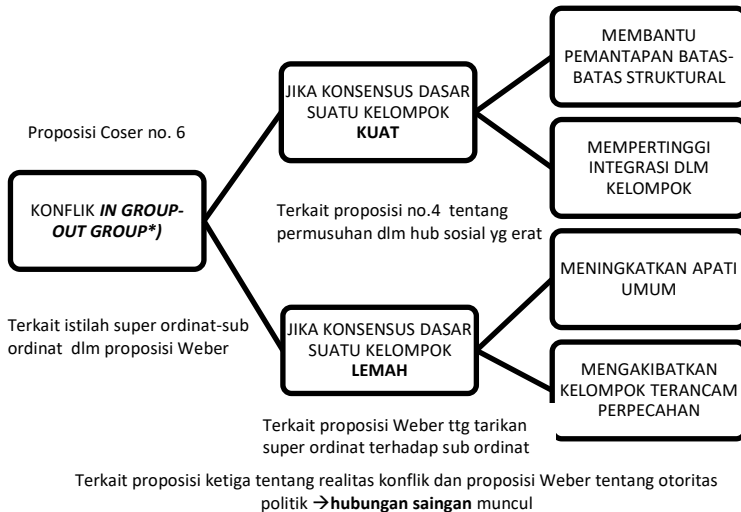
Kebalikan dari konflik realistis, suatu konflik dapat dikatakan non realistis, jika bukan berasal dari tujuan saingan antagonis, melainkan dari hubungan untuk meredakan

ketegangan (Coser dalam Rubin, 2004). Jadi hal yang perlu ditemukan dalam konflik non realistis ini adalah:

- Bagaimana hubungan yang bukan berasal dari tujuan antagonis itu bisa terjadi? serta
- Bagaimana suatu konflik dapat muncul sebagai pereda keadaan, padahal pada umumnya justru setelah konflik tersebut muncul, keadaan menjadi tegang.

Hubungan saingan

Istilah “hubungan saingan” ini terlihat bermakna stereotip karena mengandung praduga negatif terhadap kelompok lain. Jadi mungkin saja apa yang dilakukan “saingan” adalah persoalan kecil dibesar-besarkan, sementara pandangan tentang kelompoknya sendiri adalah dalam bentuk klaim kebenaran (*truth claim*). Semua itu dapat terjadi ketika konsensus dasar suatu kelompok terlihat lemah. Berikut adalah bagan tentang korelasi antar proposisi dari Coser terkait munculnya hubungan saingan dalam realitas konflik:



Gambar 20. Korelasi antar proposisi tentang hubungan saingan dalam realitas konflik

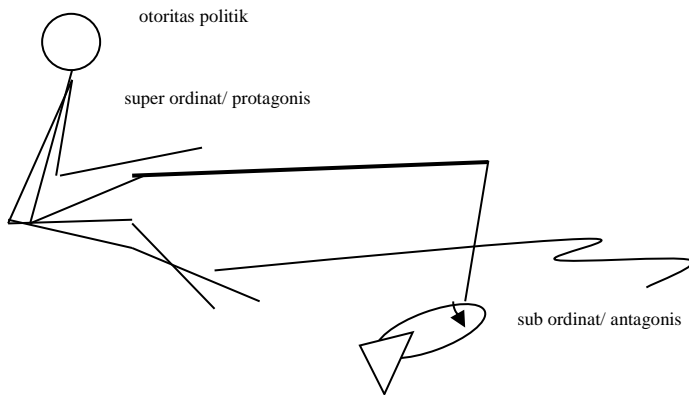
Ketika menjelaskan tentang konsensus dasar suatu kelompok, proposisi ke-6 Coser tentang “*in group-out group*” memiliki korelasi dengan proposisinya yang ke-4 tentang “permusuhan dalam hubungan sosial yang erat.” Dan pengaruh konsensus tersebut terkait dengan proposisi Coser yang ketiga tentang realitas konflik.

Terkait “hubungan saingan,” dalam proposisi Coser yang ke-6, diperlihatkan sinyalemen bahwa hal itu dapat muncul ketika konsensus dasar suatu kelompok lemah, karena ancaman dari luar tidak menjurus pada peningkatan kohesi

melainkan pada apati umum, dan mengakibatkan suatu kelompok itu terancam perpecahan. Sebaliknya, jika konsensus dasar dalam kelompok kuat, maka adanya konflik dengan kelompok luar (*out group*) akan membantu pementapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi di dalam kelompok (*in group*) (Coser dalam Rubin, 2004).

Sebagai teori yang dibangun dengan konsep jaringan, proposisi Coser, terutama tentang “*in group-out group*” juga memiliki korelasi dengan proposisi Weber terkait “tarikan super ordinat terhadap sub ordinat” di mana “super ordinat” berfungsi sebagai “*in group*” dan “sub ordinat” sebagai “*out group*”nya.

Secara imajinatif, peneliti mengibaratkan hubungan antara super ordinat dengan sub ordinat itu seperti alat pemancing dengan ikan yang dipancing. Sementara otoritas politik adalah sang pemancingnya. Tarikan tinggi otoritas politik dapat terjadi melalui: keanggotaan kelas, kelompok status dan hierarki politik atau derajat ketidaksetaraan distribusi sumberdaya dengan hierarki sosial yang tinggi atau mobilisasi hierarki sosial atas dasar kekuasaan, *prestige* serta kekayaan. Melalui kepemimpinan otoritas politik yang karismatik, maka konflik berhasil dicapai dengan tekanan yang kuat terhadap otoritas lama.

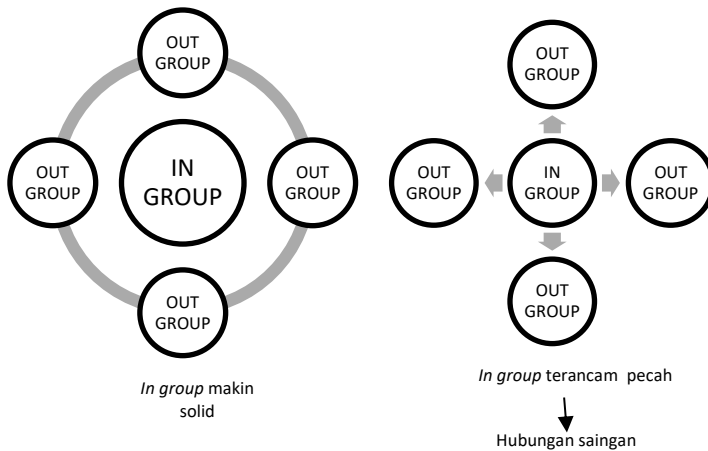


Gambar 21.
Korelasi proposisi Coser dengan proposisi Weber

Adapun teori Weber tentang “otoritas politik” dapat dikaitkan dengan teori Coser tentang “konsensus dasar dalam kelompok.” Semakin besar otoritas politiknya semakin kuat pula konsensus yang dihasilkan dan semakin kuat konsensus tersebut semakin tegas pula garis pembatas strukturalnya dengan *out group*.

Konsensus dasar kuat *)

Konsensus dasar lemah



Gambar 22. Korelasi konsensus dasar konflik dengan hubungan saingan

Konflik pereda ketegangan

Dalam proposisinya yang keempat Coser menyatakan tentang “permusuhan dalam hubungan sosial yang erat.” Proposisi ini tidak hanya menjelaskan realitas konflik *in group-out group* namun juga konflik intern (dalam *group*). Dikatakan bahwa ada kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresif. Namun semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam dan semakin besar pula kecenderungan untuk menekan daripada mengungkapkan rasa permusuhan (Coser dalam Margaret M, 1994). Karena dalam suatu hubungan yang

erat keseluruhan kepribadian terlibat, maka konflik itu, ketika benar-benar meledak akan sangat keras (Cosser dalam Rubin, 2004). Hal ini juga berlaku pada konflik non realistis. Oleh karena itu sikap agresif yang muncul dalam konflik (non realistis) dikatakan sebagai “pereda ketegangan,” dibanding sikap agresif yang ditekan namun berbahaya jika muncul sebagai konflik.

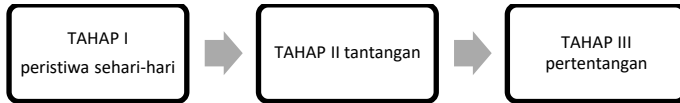


*) Hal ini juga berlaku pada konflik non realistis

Gambar 23. Korelasi sikap agresif dengan “pereda ketegangan”

Selanjutnya perlu dijabarkan pula apakah konflik yang terjadi ada pada tahap I, II atau III. Identifikasi ini bermanfaat untuk menentukan resolusi seperti apakah yang akan ditempuh, karena resolusi konflik untuk tahap I tentu saja berbeda dengan resolusi pada tahap II atau III, demikian juga sebaliknya. Terkait hal tersebut, William Hendricks dalam bukunya yang

berjudul *Bagaimana Mengelola Konflik* menjabarkan tiga tahapan tersebut sebagai berikut:



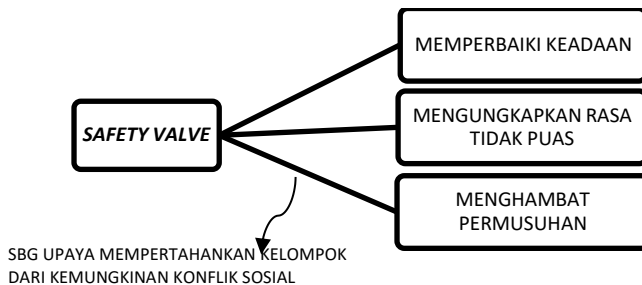
Gambar 24. Tahapan Konflik (Sumber: Hendricks, 2008: 6)

Konflik pada tahap satu tidak begitu mengancam karena menjadi peristiwa sehari-hari sehingga paling mudah untuk dikelola. Bila konflik mengalami eskalasi ke tahap dua, yaitu tahap tantangan dan tiga yaitu tahap pertentangan, maka konflik menjadi lebih sulit dikelola, dan potensinya meningkat menjadi berbahaya (2008: 6-7).

2. Penerapan Landasan Epistemologi dan Aksiologi

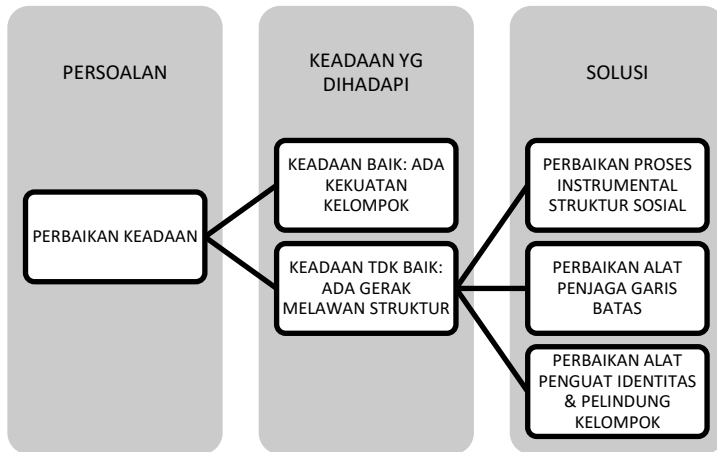
Penerapan *safety valve* sebagai resolusi konflik merupakan penerapan landasan keilmuan dari aspek epistemologi karena menjelaskan pertanyaan “bagaimana” resolusi konfliknya. Coser menjelaskan bahwa penerapan *safety valve* adalah untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Syaratnya adalah jika tidak semua struktur rusak oleh konflik sehingga mekanisme metodologi ini dapat berfungsi dengan baik. dengan cara memperbaiki keadaan

suatu kelompok yang mengalami konflik, mengungkapkan rasa tidak puas terhadap struktur, serta menghambat permusuhan agar tidak berpaling melawan obyek aslinya. Dalam konteks tersebut, kemungkinan besar perlu persiapan biaya untuk mengurangi tekanan dalam penyempurnaan sistem, memenuhi kondisi-kondisi yang sedang berubah, membendung ketegangan dalam diri individu, serta menciptakan kemungkinan tumbuhnya ledakan destruktif (Cosser dalam Rubin, 2004).



Gambar 25. Kinerja *safety valve*

a. Memperbaiki keadaan



Gambar 26. Mekanisme *Safety Valve* dalam Memperbaiki Keadaan

Perbaikan keadaan yang dimaksud adalah perbaikan keadaan menuju masyarakat ideal. Dalam hal ini, sebagai ilmuwan yang menggunakan konsep teori jaringan, Coser merujuk konsep primitif dalam sosiologi klasik tentang masyarakat yang memiliki sistem teratur. Sehingga dalam dalam proposisinya yang kelima tentang “isu fungsionalitas konflik” ia menyatakan bahwa: Keadaan yang baik adalah ketika ada “kekuatan kelompok,” sehingga ketika konflik terjadi bergerak melawan struktur maka perlu diupayakan cara untuk menghindarinya.

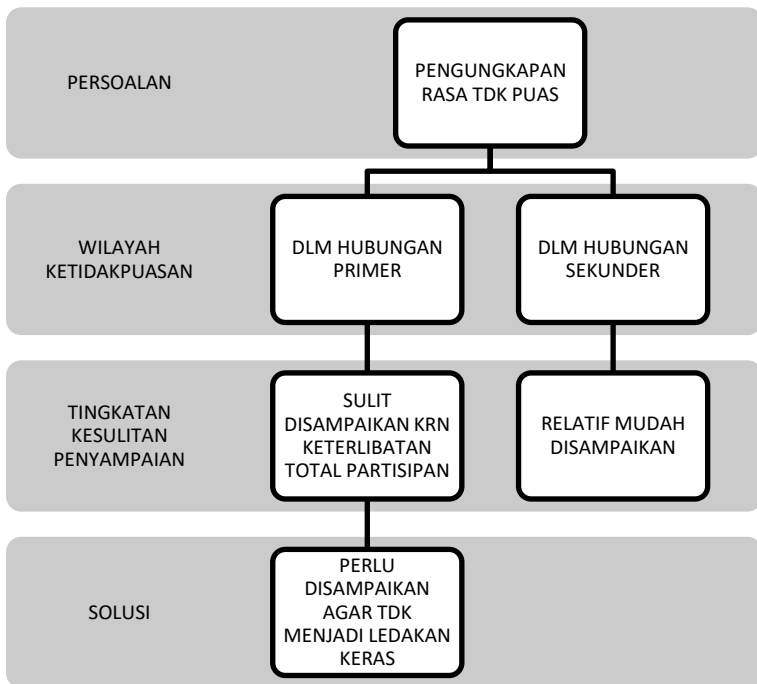
Sebagian pakar menyatakan bahwa upaya menghindari pergerakan konflik adalah tidak mungkin karena gejala ini mencakup pelbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisahkan. Dari hasil pengamatan Simmel ditemukan bahwa konflik mungkin positif. Coser pun mengembangkan proposisi tersebut dan memperluasnya. Jika hal itu terjadi dalam kondisi positif maka akan membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat, sebab konflik bisa menjadi:

- proses instrumental pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial;
- alat untuk menempatkan dan menjaga garis batas dua kelompok atau lebih; dan
- alat penguat identitas dan pelindung kelompok agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

b. Mengungkapkan rasa tidak puas

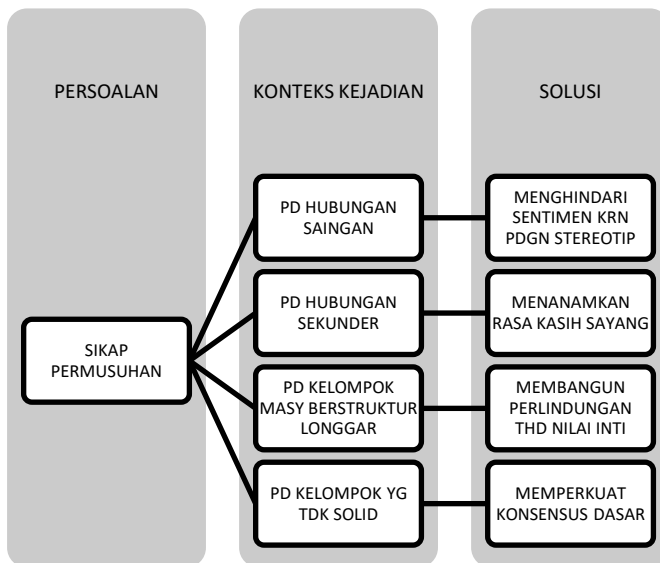
Dalam proposisi Coser yang ke 4 tentang “permusuhan dalam hubungan sosial yang erat,” dijelaskan bahwa pengungkapan rasa tidak puas relatif bebas disampaikan pada permusuhan hubungan sekunder daripada primer, karena keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan itu

(Cosser dalam Margaret M, 1994). Padahal semakin lama perasaan ditekan, maka semakin penting pengungkapannya demi mempertahankan hubungan. Jadi, konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup (Cosser dalam Rubin, 2004).



Gambar 27.
Mekanisme *Safety Valve* dalam Mengungkapkan Rasa Tidak Puas
c. Menghambat permusuhan

Permusuhan yang besar dapat muncul dalam berbagai konteks, antara lain dalam konteks hubungan saingan; dan sekunder; pada kelompok masyarakat berstruktur longgar; dan tidak solid. Untuk meminimalisirnya, maka perlu menghindari sentimen berlebihan; menanamkan kasih sayang terhadap sesama dalam hubungan sekunder; membangun perlindungan nilai inti pada kelompok yang berstruktur longgar; serta memperkuat konsensus dasar pada kelompok yang tidak solid.



Gambar 28. Mekanisme *Safety Valve* dalam Menghambat Permusuhan

Out put dari *safety valve* adalah aspek aksiologinya karena menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam konflik, yang diajukan melalui pertanyaan “mengapa atau untuk apa.” Sebagaimana disampaikan Coser dalam proposisinya yang ke 5 tentang isu fungsionalitas konflik, bahwa yang menentukan suatu konflik fungsional apa tidak adalah *tipe isu* yang merupakan subyek konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti (Margaret M 1994). Konflik yang tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan tersebut terlihat dalam konflik yang realistik karena terjadi bukan karena hubungan saingan melainkan karena tuntutan kekecewaan terhadap tujuan antagonis. Oleh karena itu, nilai-nilai positif dalam konflik tersebut perlu dipertahankan agar usaha untuk memperbaiki keadaan, mengungkapkan rasa tidak puas dan menghambat permusuhan dapat berjalan lancar. Sebaliknya, jika suatu konflik sampai menyerang nilai inti, maka nilai-nilai negatif yang muncul karena persoalan tersebut perlu dihancurkan, seperti sikap sentimen karena pandangan stereotip, sikap tanpa rasa kasih sayang, sikap ketidakpedulian untuk melindungi nilai inti serta hilangnya solidaritas kelompok.

BAB III. MEMAHAMI SETTING SOSIO HISTORIS DAN TAHAPAN KONFLIK

A. SETTING SOSIO HISTORIS

1. Obyek dan Subyek Konflik

Obyeknya konflik ini adalah:

- Persoalan berdirinya gedung sekolah SD Muhammadiyah Plus yang beralamat Jalan Suropati No. 14 Togaten sebagai sekolah yang didirikan di wilayah berkepadatan penduduk tinggi. Setting tersebut berdampak pada kemacetan yang mengganggu warga sekitar.



Gambar 29. Alamat gedung lama SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga



Gambar 30. Kemacetan di depan SD Muhammadiyah Plus

- Persoalan rencana pembangunan gedung pertemuan (aula) sekaligus gedung olah raga SD Muhammadiyah Plus di wilayah RT 05/ RW III Pengilon (200 m dari lokasi gedung lama). Persoalan kemacetan dan IMB juga menjadi isu paling penting yang melatarbelakangi konflik ini.



Gambar 31. Rancangan gedung baru SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga



Gambar 32. *Banner* penolakan gedung baru SD Muhammadiyah Plus oleh warga

Dengan demikian, subyek konflik ini adalah:

- Warga Togaten dan warga RT 05/ RW III dukuh Pengilon sebagai pihak pertama yang menempati posisi protagonis karena sebagai warga pribumi (*in group*) yang menuntut (yang mendominasi).¹
- Civitas SD Muhammadiyah Plus sebagai pihak kedua yang dianggap antagonis karena sebagai pihak pendatang (*out group*) yang dituntut (yang didominasi).

2. Peta Lokasi

Secara hierarkis, peta lokasi Togaten dan sekitarnya ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Dukuh Togaten dan Pengilon terletak di kelurahan Mangunsari, tepatnya di sebelah selatan dan barat Jalan Osa Maliki (Jalan Raya Semarang-Solo) dan sebelah utara Jalan Hasanuddin (Jalan Raya Salatiga-Magelang). Keduanya berdampingan dengan dukuh Klaseman dan Rekesan yang terletak di sebelah barat.

¹ Dalam perkembangannya, konflik di Togaten cenderung bersifat individual, sedangkan di Pengilon bersifat kelompok (*group*) sehingga konflik yang kedua berlangsung lebih lama.



Gambar 33. Pintu gerbang dukuh Togaten atau jalan masuk ke SD Muhammadiyah Plus dari arah timur.²

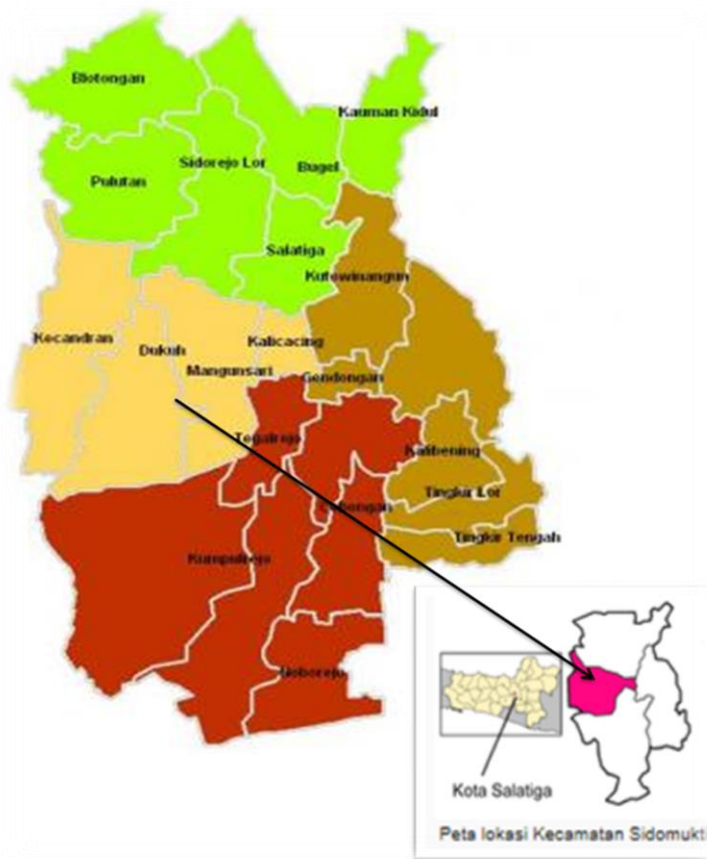
- Kelurahan Mangunsari adalah salah satu bagian dari wilayah di kecamatan Sidomukti bersama-sama dengan kelurahan Dukuh dan Kecandran yang terletak di sebelah barat dan kelurahan Kalicacing yang terletak di sebelah timur. Wilayah barat tersebut dibatasi oleh Kali Banjaran sedangkan wilayah timur yang dibatasi oleh jalan raya Semarang-Solo.

² Selain ini ada lagi pintu gerbang dukuh Pengilon atau jalan masuk ke SD tersebut dari arah utara. Baik Togaten maupun Pengilon sama-sama bagian dari kelurahan Mangunsari.



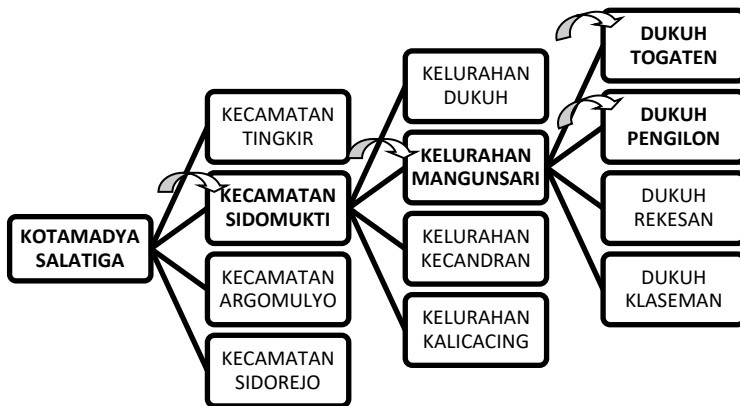
Gambar 34. Alamat kelurahan Mangunsari, Jl Hasanudin No. 1128 Salatiga

- Kecamatan Sidomukti adalah salah satu wilayah kotamadya Salatiga bersama-sama kecamatan Tingkir dan Argomulyo yang terletak di sebelah selatan serta kecamatan Sidorejo yang terletak di sebelah utara.
- Kotamadya Salatiga adalah sebuah kota di provinsi Jawa Tengah yang berbatasan sepenuhnya dengan kabupaten Semarang. Kota yang terletak 49 km sebelah selatan kota Semarang atau 52 km sebelah utara kota Surakarta ini berada di jalan negara yang menghubungkan Semarang-Surakarta.



Gambar 35. Wilayah administrasi kota Salatiga dan kecamatan Sidomukti (inset, warna merah muda)

Jika pemetaan tersebut dituangkan dalam bagan, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 36. Bagan hierarkis Togaten

Sedangkan bila ditelusuri melalui *Google Map*, maka akan diperoleh gambar peta sebagai berikut:



Gambar 37. Lokasi konflik (tanda merah) berdasarkan pencarian pada *Google Map*

Berdasarkan pemahaman bahwa Togaten dan sekitarnya adalah bagian dari kota Salatiga maka setting sosio historisnya berkorelasi sepenuhnya dengan kotamadya yang membawahnya. Berikut adalah karakteristik sosio historis kota tersebut secara umum.

3. Sejarah

Salatiga telah menjadi wilayah otonom sejak beratus tahun lalu, karena berdasarkan informasi pada prasasti Plumpungan (yang terletak di dukuh Plumpungan, desa Kauman Kidul, kecamatan Sidorejo), Salatiga telah menjadi daerah *perdikan* sejak tahun 750 M. Daerah *perdikan* adalah suatu daerah dalam wilayah kerajaan yang dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti karena memiliki kekhususan tertentu. Dengan penunjukannya sebagai wilayah *perdikan*, maka daerah tersebut harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. Penganugerahan wilayah *perdikan* tersebut diberikan oleh Raja Bhanu saat Salatiga masih bernama Hampra.

Anugerah ini merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan langka, karena hanya diberikan kepada desa-desa

yang benar-benar berjasa kepada raja. Untuk mengabadikan peristiwa itu maka raja menulis dalam Prasasti Plumpungan *Srir Astu Swasti Prajabhyah*, yang artinya: "Semoga Bahagia, Selamatlah Rakyat Sekalian." Prasasti ini ditulis pada hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 750 M. Tanggal dan bulan penulisan tersebut akhirnya ditetapkan oleh Perda Tingkat II Nomor 15 Tahun 1995 sebagai hari jadi kota Salatiga. Sedangkan penetapan pemerintah sebagai kota administratif dimulai tahun 1950 berdasarkan UU No. 13/1950.



Gambar 38. Lambang Kota Salatiga dengan motto
Srir Astu Swasti Prajabhyah

4. Kenyamanan dan Keamanan

Udara kota Salatiga sangat sejuk karena berada di lereng timur gunung Merbabu, pada ketinggian kurang lebih 700 m di atas permukaan air laut, dengan koordinat $110^{\circ} 28' 37.79''$ - $110^{\circ} 32' 39.79''$ BT. Namun karena perubahan iklim

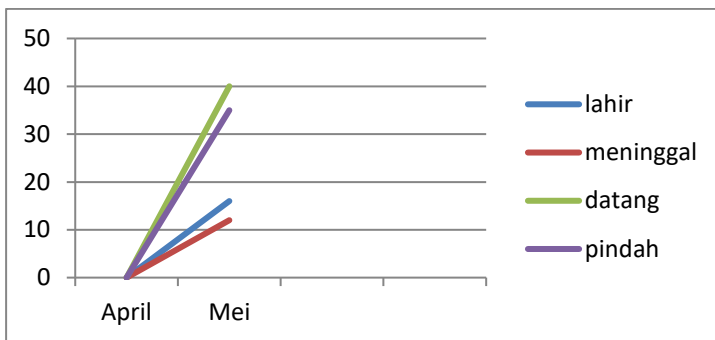
dunia (*global warming*), suhu di tempat ini sekarang sedikit memanas, menjadi berkisar antara 23 s.d. 28 derajat Celcius. Sebagai kota yang yang berhawa sejuk dan didukung kondisi kota yang aman (karena dikelilingi daerah militer di berbagai sudut kota) membuat banyak warga yang menjadikan Salatiga sebagai tempat tinggal pilihan. Baik warga asli maupun pendatang. Bahkan banyak warga yang bekerja di luar kota namun tetap memilih Salatiga sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu trayek bis antar kota yang melintasi kota tersebut senantiasa padat karena dipenuhi oleh warga yang setiap hari pulang pergi untuk bekerja di Ungaran, Semarang, Surakarta, Magelang dan sekitarnya. Demikian pula, warga yang merantau ke kota yang lebih jauh (seperti Jakarta, Surabaya, hingga luar Jawa) banyak yang memiliki keinginan untuk menghabiskan masa tua di kota kelahirannya. Pendek kata, Salatiga adalah “kota peristirahatan” yang diinginkan banyak orang. Oleh karena itu, penambahan penduduknya setiap tahun cukup besar. Bukan karena jumlah kelahiran yang tinggi, karena program KB cukup sukses di wilayah ini, melainkan karena banyaknya jumlah pendatang. Berikut adalah data penambahan dan pengurangan penduduk di kelurahan Mangunsari dalam satu bulan (dari akhir April-akhir Mei):

NO	PERENCANAAN	WNI		Org Asing		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L +P
1	Pddk awal bulan ini (Mei)	8.642	8.868	22	20	8.664	8.888	17.552
2	Kelahiran	12	4			12	4	16
3	Kematian	6	6			6	6	12
4	Pendatang	13	20	4	3	17	23	40
5	Pindahan	12	23			12	23	35
6	Pddk akhir bulan ini	8.649	8.863	26	23	8.675	8.886	17.561

Sumber: Laporan Monografi Bulan Mei 2014

Gambar 39. Tabel Kepadatan Penduduk Kelurahan Mangunsari

Pada bulan April 2014, kepadatan penduduk di kelurahan Mangunsari berjumlah 17.552 orang, kemudian meninggal 12 orang dan lahir 16 orang. Jumlah kelahiran ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sekian banyak. Pertambahan yang relatif banyak adalah dari kaum pendatang yaitu sejumlah 40 orang, namun penduduk yang pindah juga cukup banyak yaitu 35 orang. Sehingga total jumlah penduduk di bulan Mei adalah 17. 561 orang. Jika informasi tersebut disusun dalam bentuk grafik, maka akan muncul gambar sebagai berikut:

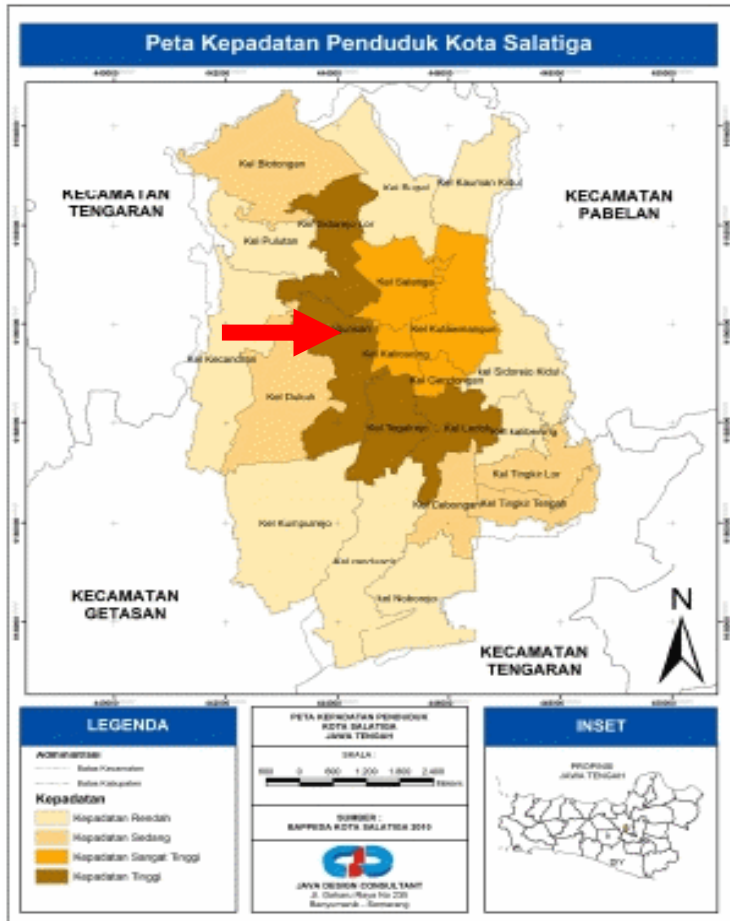


Gambar 40. Grafik pertambahan dan pengurangan penduduk dalam sebulan

5. Kepadatan Penduduk

Sebagai wilayah otonom sejak abad ke 8 M wajar jika Salatiga berkembang menjadi kota yang padat penduduknya. Apalagi wilayahnya sangat sempit. Luas administratifnya yang hanya 56,781 km², menempatkannya pada peringkat ke-18 kotamadya terkecil di Indonesia. Oleh karena itu secara bertahap, kotamadya ini kemudian mengadakan pemekaran wilayah dengan cara memasukkan beberapa wilayah perbatasan milik wilayah lain menjadi bagian wilayahnya. Dengan cara itu diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan penduduk tidak hanya berorientasi untuk tinggal di wilayah yang sudah padat penduduknya.

Gambar peta kepadatan penduduk Salatiga:



Sumber: BAPPEDA Kota Salatiga 2014

Gambar 41. Peta Kepadatan Penduduk Kota Salatiga. Tanda panah adalah wilayah Togaten dan sekitarnya sebagai wilayah berkepadatan penduduk tinggi

Wilayah yang berkepadatan penduduk *rendah* umumnya adalah wilayah pemekaran terbaru yang sebelumnya menjadi bagian dari kabupaten Semarang kemudian diambil alih oleh kotamadya Salatiga. Wilayah tersebut adalah: kelurahan Kumpulrejo, Randuacir dan Noborejo di kecamatan Argomulyo; kelurahan Kecandran di kecamatan Sidomukti; kelurahan Pulutan, Bugel dan Kauman Kidul di kecamatan Sidorejo; serta kelurahan Sidorejo Kidul dan Kalibening di kecamatan Tingkir. Kemudian wilayah yang berkepadatan penduduk *sedang*. Sebagian wilayah ini (kecuali Dukuh dan Blotongan) semula juga bagian dari wilayah kabupaten Semarang, namun sudah masuk ke wilayah Salatiga lebih lama dari wilayah yang pertama sehingga sudah cukup banyak penduduknya. Wilayah tersebut adalah: kelurahan Cebongan, Tingkir Tengah dan Tingkir Lor di kecamatan Tingkir; kelurahan Dukuh di kecamatan Sidomukti; dan kelurahan Blotongan di kecamatan Sidorejo. Lalu wilayah yang berkepadatan penduduk *tinggi* adalah: kelurahan Tegalrejo dan Ringinawe di kecamatan Tingkir; kelurahan Mangunsari di kecamatan Sidomukti; dan kelurahan Sidorejo Lor di kecamatan Sidorejo. Adapun kepadatan penduduk yang *sangat tinggi* adalah kelurahan Kalicacing di kecamatan Sidomukti;

serta kelurahan Kutowinangun, kelurahan Gendongan dan kelurahan Salatiga, ketiganya di kecamatan Sidorejo. Berdasarkan data ini, maka Togaten dan sekitarnya termasuk wilayah berkepadatan penduduk tinggi karena bagian dari wilayah kelurahan Mangunsari.

Kepadatan Togaten dan sekitarnya tersebut terlihat dari potret udara *Google Map* yang memperlihatkan tata letak bangunan yang berhimpitan satu sama lain.



Gambar 42. Kepadatan Togaten dan sekitarnya. Lokasi gedung SD Muhammadiyah Plus serta lokasi untuk gedung barunya terletak di wilayah yang paling padat
(Sumber: *Google Map*)

6. Kehidupan Ekonomi-Sosial

Kehidupan ekonomi-sosial warga dapat dilihat dari tabel jenis pekerjaan berikut:

Nomor	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/ tidak bekerja	1560	1553	3119
2.	Mengurus rumah tangga	1	2195	2196
3.	Pelajar/ mahasiswa	1908	1753	3662
4.	Pensiunan	291	227	518
5.	PNS	338	281	619
6.	TNI	55	0	55
7.	Kepolisian RI (POLRI)	41	2	43
8.	Perdagangan	40	62	102
9.	Petani/ Pekebun	11	3	14
10.	Peternak	4	0	4
11.	Industri	5	3	8
12.	Konstruksi	4	0	4
13.	Transportasi	15	2	17
14.	Karyawan Swasta	1988	1458	3446
15.	Karyawan BUMN	46	19	65
16.	Karyawan BUMD	15	4	19
17.	Karyawan Honorer	47	37	84
18.	Buruh Harian Lepas	1031	460	1491
19.	Buruh Tani/ Perkebunan	23	5	28
20.	Buruh Perikanan	3	1	4
21.	Buruh Peternakan	8	1	9
22.	PRT	0	42	42
23.	Tukang Cukur	9	0	9
24.	Tukang Listrik	5	0	5
25.	Tukang Batu	52	0	52
26.	Tukang Kayu	8	0	8
27.	Tukang Las/ Pande Besi	6	0	6
28.	Tukang Jahit	6	24	30
29.	Penata Rias	2	2	4
30.	Mekanik	25	0	25
31.	Seniman	7	1	8

32	Perancang Busana	0	1	1
33	Pendeta	17	7	24
34	Pastor	1	0	1
35	Juru Masak	1	0	1
36	Anggota DPRD	1	0	1
37	Dosen	37	21	58
38	Guru	51	124	175
39	Pengacara	2	2	4
40	Notaris	0	1	1
41	Arsitek	2	1	3
42	Akuntan	1	1	2
43	Konsultan	1	1	2
44	Dokter	5	8	13
45	Bidan	0	2	2
46	Perawat	3	17	20
47	Penyiar Radio	1	0	1
48	Pelaut	8	0	8
49	Peneliti	2	0	2
50	Sopir	89	0	89
51	Pedagang	114	176	290
52	Perangkat Desa	2	0	2
53	Wiraswasta	772	384	1156
Jumlah total		8.674	8.886	17.561

Sumber: Laporan Monografi Bulan Mei 2014

Gambar 43. Tabel kependudukan berdasarkan jenis pekerjaannya

Kolom-kolom di atas dapat disederhanakan menjadi dua kelompok masyarakat berdasarkan penghasilannya yaitu borjuis sebagai kelompok yang berpenghasilan tinggi dan proletar sebagai kelompok yang berpenghasilan rendah. Namun berbeda dengan identifikasi Marx yang mengatakan bahwa kelompok tersebut berkorelasi dengan jumlah, yakni kelompok borjuis sebagai kelompok yang berjumlah besar dan proletar

adalah sebaliknya, maka identifikasi tersebut tidak berlaku sepenuhnya. Artinya, jumlah saja tidak dapat dikatakan sebagai ukuran, karena jumlah yang sedikit belum tentu dari kalangan borjuis tetapi mungkin karena profesi itu dijalani di luar daerah atau jarang diminati masyarakat setempat. Contohnya profesi buruh nelayan yang berjumlah 4 orang. Profesi ini tentu saja tidak diminati warga Togaten, karena wilayah mereka adalah pegunungan. Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan tersebut kemungkinan adalah perantau yang masih menggunakan KTP asalnya.

Kelompok minoritas borjuis antara lain pengacara 4 orang, notaris 1 orang, arsitek 3 orang, akuntan 2 orang, konsultan 2 orang dan dokter 13 orang. Mereka dikatakan borjuis karena memiliki modal “skill” dan penghasilan yang besar. Sementara, buruh nelayan meskipun juga minoritas namun penyebabnya adalah karena wilayah Salatiga bukan wilayah perikanan. Adapun data monografi yang relevan dengan konteks definisi proletar Marx adalah kelompok mayoritas yang hanya mengandalkan penghasilan dari upah karena bukan sebagai pemilik modal, antara lain karyawan swasta sebanyak 3.446 orang; dan buruh harian lepas sebanyak 1.491 orang.

Berdasarkan data di atas, memang di wilayah Togaten dan sekitarnya terdapat fenomena borjuis-proletar namun hal itu tidak terlalu menonjol karena mayoritas mereka adalah kelompok menengah ke atas. Logikanya adalah bahwa meskipun mereka adalah karyawan pabrik atau buruh lepas namun jika mereka memiliki rumah pribadi di wilayah ini berarti mereka bukan dari kalangan bawah karena asset yang mereka miliki mahal. Kelompok masyarakat bawah yang tidak memiliki tanah pribadi jumlahnya relatif sedikit.



Gambar 44. Stratifikasi di Togaten dan sekitarnya

7. Kehidupan Keagamaan

Sudah sejak lama Salatiga dikenal sebagai kota Salib karena kota ini dihuni oleh mayoritas warga yang beragama Kristen. Setidaknya sudah ada dokumentasi tentang sebuah

gereja pada tahun 1880 M sehingga dapat dikatakan bahwa komunitas umat Kristen tersebut mendominasi karena sudah eksis sejak lama. Sementara pada masa kini, Salatiga identik dengan UKSW sebagai salah satu Perguruan Tinggi Kristen terkemuka di Indonesia. Selain itu hampir di seluruh wilayah kelurahan dapat ditemukan dengan mudah bangunan gereja. Namun sebagaimana kondisi keagamaan di wilayah Jawa pada umumnya, sebelum masyarakat mengenal Kristen dan Islam, terlebih dahulu mereka mengenal Hindu dan Buddha.



Gambar 45. Lukisan oleh Josias Cornelis Rappard yang menggambarkan gereja di Salatiga (tahun 1880-an)

Benny Ridwan dalam tulisannya yang berjudul *Potret Organisasi Keagamaan dan Respon terhadap Dinamika Kehidupan Keberagamaan di Salatiga* menyebutkan bahwa nama Salatiga diambil dari nama tokoh agama Buddha, Dewi Trisala. Menurut Baehaqi sebagaimana dikutip oleh Ridwan, dikatakan bahwa Dewi Trisala atau Siddhadewi adalah tokoh penganut agama Budha aliran Jaina yang dikenal sangat dekat dengan tradisi Hindu (Baehaqi, 2002:184). Diduga, semangat yang ditanamkan oleh Dewi inilah yang kelak kemudian hari turut membentuk tipologi masyarakat Salatiga yang bisa menerima dan tidak fanatik terhadap kehadiran agama baru, yakni Islam dan Kristen. Ridwan menyatakan bahwa kehidupan keagamaan yang cukup harmonis pada masa kini itu tergambar dari fenomena para ibu yang terlibat merawat jenazah yang berlainan agama; anak-anak muslim yang terlibat aktif berkesenian barongsai selepas dari belajar di TPA; dan pemuda gereja yang turut membantu penggalangan dana sebuah pembangunan masjid.

Khusus tentang Togaten dan sekitarnya, pada saat ini memang didominasi oleh masyarakat Kristen namun pada umumnya mereka adalah para pendatang karena mereka mulai mendominasi sejak wilayah tersebut terdapat Perumst

(Perumahan UKSW/ Universitas Kristen Satya Wacana) yang cukup luas serta beberapa bangunan yang mengindikasikan geliat keagamaan Kristen seperti GKJ (Gereja Kristen Jawa), gedung Pasca Sarjana UKSW serta asrama bagi para pendeta (*father's house*).

Tidak ada informasi mengenai keyakinan nenek moyang warga yang asli. Hanya diketahui bahwa nama Togaten berasal dari nama sang 'pendiri' dukuh itu, yaitu Mbah Togati yang mungkin beragama Hindu atau Buddha. Yang jelas, warga Togaten saat ini masih identik dengan *Kejawen* nya sehingga meskipun mereka beragama Kristen atau Islam namun unsur *Kejawennya* masih kuat. Tidak heran jika mayoritas nama mereka adalah bernuansa Jawa. Hal ini peneliti temukan tanpa sengaja ketika melihat daftar nama-nama pemilih presiden di kelurahan Mangunsari Salatiga. Fenomena ini sangat menarik, karena di wilayah lain, nama seperti Nur, Siti, Muhammad dan Ahmad adalah nama *pasaran*, sementara di Togaten dan sekitarnya jarang sekali ditemukan nama tersebut karena lebih didominasi oleh nama-nama seperti Sukarno, Sutomo, Wati, Hastuti dan seterusnya (Sumber: Data Pemilih Presiden 2014 di kelurahan Mangunsari, Salatiga).

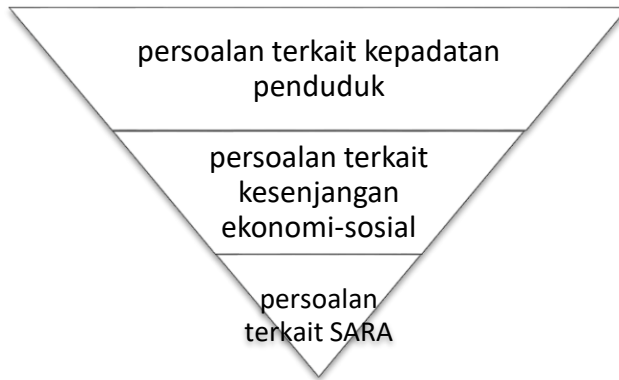
Masyarakat Kejawaen pada umumnya cukup kooperatif dengan pemeluk keyakinan yang berbeda. Mereka dapat menerima ajaran apapun selama ajaran itu mereka anggap baik. Itulah sebabnya ketika mereka menganut suatu agama, misalnya Kristen atau Islam, mereka cenderung sulit menjalankan ajaran tersebut secara *kaffah*, karena akar ajaran lama yang telah mendarah daging, tidak dapat dihilangkan sama sekali. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa mereka dipandang melakukan sinkretisme agama sebab keyakinan dan ritual yang mereka lakukan adalah perpaduan antara dua ajaran agama atau lebih.

Contoh kehidupan yang toleran dan harmonis pada warga, peneliti temukan dari salah satu siswa SD Muhammadiyah Plus. Almarhum ayahnya adalah muslim dan ibunya *muallaf*. Sebelum ayahnya meninggal mereka sekeluarga tinggal di luar Salatiga. Setelah meninggal, rumah itu dijual dan mereka kembali ke rumah sang kakek di Togaten. Di rumah itu semuanya beragama Kristen sehingga nuansa keagamaan Kristen sangatlah kental. Jika mau, sang kakek sebenarnya bisa menyekolahkan sang cucu di sekolah Kristen yang banyak terdapat di Salatiga. Namun beliau justru menyekolahkannya di sekolah Islam dengan alasan cukup

simple, yaitu karena jaraknya dekat dari rumah. Dengan bersekolah di SD Muhammadiyah, otomatis anak tersebut dididik secara Islami. Dan ternyata hal itu juga diimbangi dengan didikan di rumah. Meskipun sebagian besar keluarganya non muslim, namun ia tetap diingatkan untuk menjalankan sholat dan puasa. Mungkin karena toleransi yang tinggi itu pula lah, saat sang kakek hendak menghadap Sang Kholiq, beberapa tetangga dan kerabatnya yang muslim dengan sukarela mendampingi di masa-masa akhir itu dengan rangkaian bacaan Surat Yasin. Hal ini benar-benar unik dan menarik. Kesemuanya itu berlangsung secara alamiah dan terjadi bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan.

B. TAHAPAN KONFLIK

Berdasarkan uraian tentang korelasi konflik dengan setting sosio historis, terlihat bahwa aspek kepadatan penduduk paling mendominasi, disusul aspek kesenjangan ekonomi-sosial baru kemudian aspek persoalan SARA. Konflik realistik terutama muncul karena terkait kepadatan penduduk yang tinggi sedangkan konflik non realistik cenderung muncul karena setting persoalan ekonomi dan SARA.



Gambar 46. Urutan dominasi realitas konflik terkait setting sosio historis

Konflik realistik lebih mudah dihadapi dari pada konflik non realistik karena jika tuntutan kekecewaan protagonist terhadap tujuan saingannya dipenuhi maka persoalan sudah selesai. Oleh karena itu pada umumnya konflik jenis ini hanya sampai pada tahap kedua. Namun tidak demikian dengan konflik non realistik. Konflik yang ada mungkin hanya sekedar pereda ketegangan karena masing-masing pihak mungkin sama-sama memiliki fanatisme golongan bernuansa *truth claim* yang dapat memicu konflik pada tahapan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya dalam konteks ini, dalam waktu yang tak terduga, sering terjadi lompatan konflik dari tahap satu ke tahap tiga.

1. Konflik Tahap I

Hendricks (2008: 8) menjelaskan konflik tahap I sebagai berikut:

Karakteristik konflik tahap I antara lain adalah terjadi terus menerus dan biasanya memerlukan sedikit perhatian. Konflik tahap ini ditandai perasaan jengkel sehari-hari. Perasaan jengkel ini dapat berlalu begitu saja, kadang-kadang muncul tak menentu. Tidak ada yang dapat meramalkan kapan seorang individu merasa cukup jengkel. Namun ketika suatu perubahan terjadi maka seperti alarm yang akan mengingatkan individu untuk mengeluarkan “konflik yang dipendamnya.”

Kekecewaan warga akibat kemacetan yang ditimbulkan banyaknya kendaraan antar jemput siswa SD berlangsung cukup lama karena semula dianggap biasa, sebab wilayah sekitar konflik ini, yaitu di perempatan Palang (yang mempertemukan arus kendaraan Togaten-Pengilon, Solo- Pos Tingkir-ABC, Ring Road-Klaseman-Rekesan dan Semarang) serta di perempatan Pasar Sapi (yang mempertemukan arus kendaraan Salatiga kota, Solo-Pos Tingkir-ABC, Semarang dan Kopeng–Magelang) juga akrab dengan kemacetan, sehingga tanpa kehadiran SD Muhammadiyah Plus pun warga juga selalu menemui kemacetan begitu keluar dari jalan kampung mereka.



Gambar 47. Kemacetan di perempatan Pasar Sapi

Begitu juga dengan persoalan parkir, pada awalnya juga tidak ada protes terhadap pihak SD karena warga sendiri (terutama yang tidak memiliki garasi di rumahnya) juga sering parkir di ruas jalan kampung mereka.

2. Konflik Tahap II

Konflik tahap II adalah tahap tantangan. Perubahan konflik antara pihak SD Muhammadiyah dengan warga berubah dari tahap I menjadi tahap II kira-kira sejak bulan September 2013.

Karakteristik konflik tahap II menurut Hendricks (2008: 11) adalah:

Konflik diterima sebagai unsur kompetisi pada Tahap Dua, ditandai dengan “sikap kalah menang.” Kekalahan tampaknya lebih besar pada tahap ini sebab diikat oleh masalah. Kepentingan pribadi dan “bagaimana seorang melihat” menjadi sangat penting. Sikap “yang tersembunyi” dapat juga diamati. Pada tahap Dua orang menjaga dan mempertahankan kemenangan verbal dan merekam kesalahan, dan melihat dari satu sisi.

Sekitar bulan September 2013 tersebut, seorang warga Togaten (sebut saja Bapak X) menyatakan secara terbuka bahwa ia menentang eksistensi SD Muhammadiyah Plus di wilayah tempat tinggalnya. Kemarahan ini dipicu oleh kehadiran seorang wali murid yang memarkirkan mobil di pinggir jalan di depan rumahnya. Setelah wali murid kembali ke mobilnya. Tak disangka Pak X sudah berdiri di dekat mobil tersebut sambil berkacak pinggang. Wajahnya memerah karena menahan amarah yang siap dimuntahkan. Wali murid (W) ini tentu saja sangat kaget, karena tidak menyangka akan mendapat kemarahan sebesar itu. Kenapa orang itu sedemikian, namun ia segera sadar untuk memilih bersikap mengalah daripada harus berlama-lama adu mulut disaksikan kedua anaknya yang masih kecil. Berikut perbincangan mereka:

X : “Anda yang punya mobil ini? Ini bukan tempat parkir!” Wali murid itu mengangguk .

W: “Ya, Pak, saya mohon maaf. Tadi saya tidak ijin dulu karena tidak ada orang.”

X : “Yang paling salah SD itu. Kenapa mereka membangun sekolah tanpa menyediakan lahan parkir. Jalan ini yang membangun warga. *Nggak* ada kontribusinya sama sekali sekolah itu untuk warga sini. Mereka itu pendatang yang hanya berpihak pada orang kaya yang menjadi biang kemacetan di kampung ini. Coba, mana perhatiannya sama warga miskin di sekitarnya? *Nggak* ada. Jangankan memberi beasiswa untuk mereka, pedagang kecil yang jualan makanan ringan saja mereka usir”
Wali murid itu tidak mau berdebat lebih lama .

W: “Baik, Pak, nanti saya sampaikan ke pihak sekolah.
Terimakasih” (Nara Sumber: wali murid W)

Tidak berapa lama setelah peristiwa ini, Pak X mendatangi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah, Bapak Sutomo, M.Ag. Pihak sekolah pun memohon maaf atas peristiwa tersebut dan berjanji akan mencari cara agar peristiwa itu tidak terulang kembali (Nara Sumber: Kep Sek).

3. Konflik Tahap III

Dibandingkan dengan tahapan konflik yang terjadi di Togaten, tahapan konflik di Pengilon lebih tinggi, karena tidak hanya pada tahap tantangan melainkan sudah sampai pada tahap pertentangan (tahap III) dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Karakteristik konflik tahap III menurut Hendricks (2008: 14-15) adalah:

Konflik pada Tahap Tiga, tujuannya mengubah keinginan untuk menang menjadi keinginan untuk “menciderai” (baik dalam arti sebenarnya ataupun kiasan,-red). Motivasinya adalah untuk “menghilangkan” kelompok lain. Pihak dalam dan luar diidentifikasi oleh kelompok yang bersaing seperti orang memilih sisi “isu yang menjadi masalah.” Dalam pemikiran individu yang sedang berada dalam konflik Tahap Tiga, kepentingan pribadi dan “organisasi yang baik” disamakan. Pemimpin yang muncul dari kelompok yang berkonflik bertindak sebagai juru bicara. Pihak luar dituduh sebagai pihak yang menyebabkan konflik. Fakta-fakta kecil berkembang dan kohesivitas kelompok menjadi jauh lebih penting daripada kesatuan organisasi.

Konflik ini diawali rencana pembangunan gedung baru di wilayah Pengilon sebagai solusi tidak seimbangny ruang dengan kebutuhan di Togaten. Namun sebelum terealisasi, tak

disangka ternyata ditolak secara terang-terangan oleh warga. Alasan penolakan pembangunan gedung ini awalnya juga tidak jauh beda dengan alasan penolakan yang disampaikan oleh Bapak X dari Togaten, terutama karena persoalan kemacetan. Pihak SD kemudian menjelaskan bahwa di lahan yang baru nanti akan dibangun lahan parkir yang memadai sehingga kasus parkir di ruas jalan tidak akan terjadi lagi. Namun persoalan yang kemudian bergulir deras adalah persoalan perijinan. Pembangunan tersebut dianggap tidak sah karena pihak sekolah tidak meminta izin terlebih dahulu kepada warga. Pihak sekolah kemudian meminta izin warga dengan meminta tanda tangan mereka satu persatu hingga mereka mendapat IMB dari pihak terkait. Ternyata hal ini tetap membuat warga tidak berkenan karena caranya dianggap *back street* (main belakang).



Gambar 48. Lokasi SD Muhammadiyah Plus (Sumber: *Google Map*)

Penolakan tersebut akhirnya berakhir dengan pembatalan acara peletakan batu pertama yang sudah direncanakan dengan matang pada hari Sabtu 16 Desember 2013 bersamaan dengan pengajian akbar dan sunatan massal. Sementara dua acara yang terakhir tetap berlangsung dengan lancar, hanya saja penyelenggaraannya dilaksanakan namun diselenggarakan di tempat lain



Gambar 49. Wawancara peneliti dengan warga/ tokoh masyarakat sekitar lokasi konflik

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak terkait yang peneliti susun menjadi satu rangkaian cerita.

Peneliti : Sejak kapan sebenarnya warga melakukan penolakan terhadap pendirian gedung baru tersebut, Pak?

Bapak Jumadi (pelindung SD) :Setelah kami kerja bakti membersihkan lahan kosong itu. Pada waktu kerja bakti itu kami sudah ditegor agar melakukan ijin terlebih dahulu kepada warga. Kami menyetujui untuk bertemu dengan para warga. Namun entah kenapa berita (negatif) tentang perijinan itu begitu cepat menyebar di kalangan mereka sehingga esok harinya sudah ada *banner* penolakan mereka di lahan tersebut.

Bapak Sukarno (mantan RT 05) :Jum'at, tanggal 15 Desember 2013, pihak SD Muhammadiyah Plus mengadakan kerja bakti membersihkan lahan karena esok hari akan dilakukan peletakan batu pertama (pembangunan gedung olah raga sekaligus aula). Kami yang kebetulan lewat lalu menegur orang-orang yang sedang kerja bakti. Sebelumnya, kami sudah menerima pengaduan warga tentang kemacetan akibat banyaknya kendaraan antar jemput siswa SD. Kami lalu bertanya: "*Mau* ada acara apa ini Pak, *kok bersih- bersih?*" Mereka menjawab: "*Mau* ada peletakan batu pertama, Pak,

sekaligus pengajian akbar dan sunatan massal.” Kami lalu bertanya lagi: “Apakah sudah ijin ke warga?” Mereka menjawab: “Belum, nanti akan menyusul setelah peletakan batu pertama selesai.”

Peneliti : Pandangan bapak tentang jawaban tersebut bagaimana?

Pak Sukarno : Menurut kami, peletakan batu pertama tanpa ijin warga ini adalah tindakan yang tidak benar, karena lahan tersebut terletak di tengah pemukiman warga.

Peneliti : Resolusi dari pihak SD bagaimana?

Pak Jumadi : Kami berjanji akan untuk bertemu dengan warga tanggal 17 Desember, tujuannya adalah meminta ijin kepada mereka. Namun karena tanggal 16 Desember itu warga sudah memasang *banner* penolakan, ya sudah kami tidak jadi datang.

Pak Sukarno : Pihak SD bersedia meminta ijin. Namun sebelum pertemuan dengan pihak SD, sorenya kami melakukan acara sarasehan warga. Hasilnya adalah bahwa warga melarang

pendirian gedung tanpa permohonan ijin. Sebagian warga lalu berinisiatif membuat 2 *banner* berwarna kuning dengan ukuran kurang lebih 100 x 50 cm dan bertuliskan kata-kata penolakan dengan warna merah menyala. *Banner* itu mulai dipasang tanggal 16 Desember. Peletakan batu pertama itu pun akhirnya dibatalkan. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 17 Desember tetap berlangsung, tetapi pihak SD tidak ada yang datang.

- Peneliti : Jadi pokok persoalannya adalah IMB ya, Pak?
- Pak Jumadi : Ya. Untuk selanjutnya silahkan ditanyakan kepada Mas Tomo saja (Pak Sutomo M.Ag, Kep. Sek. SD Muhammadiyah Plus), karena beliau lah yang kemudian mengikuti pertemuan-pertemuan lanjutan.
- Pak Sutomo : Benar, pokok persoalannya adalah perijinan. Sebenarnya untuk saat ini soal perijinan sudah beres atau secara hukum pembangunan gedung baru itu tidak bermasalah. Hanya saja

kami belum melakukannya karena suasana belum kondusif.

Pak Sukarno : Awalnya kami tidak tahu kalau persoalan perijinan itu ternyata menjadi persoalan yang amat penting. Karena alasan warga menolak pembangunan gedung tersebut sebenarnya karena efek kemacetan dan kegaduhan yang akan ditimbulkan. Namun sejak ada mediasi dari pemerintah (mulai tanggal 17 Desember 2013), kami jadi tahu bahwa pendirian gedung tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses perijinan terlebih dahulu, dimulai ijin dari pihak warga terlebih dahulu baru kemudian kepada dinas terkait. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pembangunan tersebut tidak sah. Itulah sebabnya kami juga jadi mempertanyakan, jangan-jangan pendirian sekolah di lahan lama juga bermasalah karena setahu kami, ijinnya dahulu adalah untuk pendirian TK bukan SD.

Peneliti : Jika persoalan utamanya adalah perijinan, apakah berarti penolakan tersebut akan

berakhir jika pihak SD sudah melakukan perijinan, Pak?

Pak Sukarno : Iya. Tapi persoalannya kan perijinan itu ada syaratnya.

Peneliti : Maksudnya harus menangani persoalan kemacetan dulu baru diijinkan, begitu ya, Pak?

Pak Sukarno : Betul. Oleh karena itu pada tanggal 23 Desember lalu, dilakukan rapat koordinasi tahap pertama yang dihadiri oleh bapak Jumadi dan bapak Sutomo (Kep. Sek.); ketua RT, RW; Camat, Lurah, Kapolres dan Kapolsek. Saat itulah pihak aparat menanyakan kepada warga tentang alasan penolakan. Pihak warga pun menjelaskan soal perijinan. Aparat membenarkan bahwa ijin tersebut memang penting. Rapat ini menghasilkan persetujuan tentang tata kelola wilayah. Untuk mendirikan sebuah bangunan, memang perlu ijin pendirian dari warga terlebih dahulu sebelum membuat perijinan ke pihak terkait. Pihak SD

menyetujui ketentuan tersebut. Mereka bersedia meminta ijin kepada warga dengan cara meminta dukungan pembangunan gedung melalui pengumpulan tanda tangan. Pada tanggal 26 Desember, warga yang dimintai tanda tangan tersebut, terutama warga yang punya tanah bersinggungan dengan lahan SD, lalu mengadu ke RT sehingga persoalan ramai kembali. (Perijinan ini dianggap tidak memenuhi syarat, karena persoalan yang dikeluhkan warga tentang kemacetan dan kegaduhan belum jelas solusinya). Dua hari kemudian yaitu pada tanggal 28 Desember, akhirnya para warga dipanggil pihak kecamatan untuk dengar pendapat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Camat, Pejabat Tata Kota, Babinsa, ketua RT dan RW.

- Peneliti : Apa yang dikeluhkan warga, Pak sehingga tanda tangan mereka dipermasalahkan?
- Pak Sukarno : Keluhan yang mereka sampaikan secara umum terkait 3 hal yaitu:

(1) *Kemacetan*: Pembangunan gedung baru beresiko memperparah kemacetan karena jalan di depan lahan terlalu sempit dan tidak mungkin akan diperlebar lagi. Semula hanyalah jalan setapak, lalu pada tahun 1989 diperlebar atas inisiatif warga dengan cara menebangi semua pohon sepanjang jalan tersebut. Pelebaran jalan dengan cara yang sama tidak memungkinkan lagi karena saat ini pemukiman di sekitar jalan tersebut sudah sangat padat; (2) *Larangan berjualan*: Pihak SD tidak memperbolehkan warga berjualan di depan sekolah, sehingga sekolah dianggap tidak berpihak pada warga sekitar; (3) *Kegaduhan*: Warga yang bertempat tinggal di sekitar sekolah merasa sangat terganggu dengan kegaduhan yang ditimbulkan anak-anak.

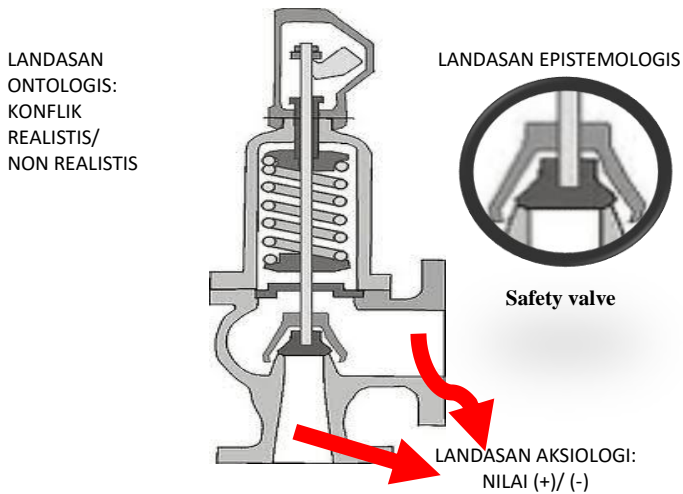
Hingga tulisan ini diturunkan, atau hampir setahun setelah pemasangannya, *banner* penolakan gedung sekolah di Pengilon masih tetap di tempat. Antara kedua belah pihak tampaknya tidak dapat menemukan satu kesepakatan.

BAB IV. SAFETY VALVE DAN KONTRIBUSI NILAI-NILAINYA

A. SAFETY VALVE SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK

Berdasarkan landasan teori, hal yang perlu digarisbawahi dalam menerapkan *safety valve* adalah:

- *Pertama*, sebagai landasan epistemologi maka teori ini akan menjadi “alat pengolah” konflik, baik realistik maupun non realistik sehingga diperoleh cara untuk memperbaiki keadaan bagi *out group* (nilai yang dipertahankan) dan mengungkapkan rasa tidak puas bagi *in group* (nilai yang dihancurkan).



Gambar 50. Imajinasi *Safety Valve*

- *Kedua*, sebagai bagian dari teori yang berpandangan bahwa konflik tidak bisa dilenyapkan maka teori ini hanya berusaha mengendalikan konflik supaya tidak menjadi manifest dalam bentuk kekerasan (*violence*).
- *Ketiga*, sebagai bagian dari model pendekatan konflik dari aspek ketahanan sosial (*social resilience*) maka teori ini mengindikasikan pemahaman dan analisa konflik pada asumsi bahwa masyarakat tidak mudah termakan isu yang belum jelas dan bahwa dalam masyarakat memiliki kemampuan internal untuk mengatasi (potensi) konflik maupun perselisihan.

- *Keempat*, sebagai metode yang memfokuskan diri untuk mempertahankan kelompok dari konflik sosial maka teori ini memiliki harapan untuk memperbaiki keadaan dengan mewedahi ketidakpuasan terhadap struktur yang belum sepenuhnya hancur (Cosser dalam Robin, 2004). Hal itu juga dapat diterapkan di Togaten dan sekitarnya karena mereka yang berkonflik adalah sesama kaum terpelajar yang menyadari pentingnya hidup harmonis di tengah masyarakat yang multikultural.

FOKUS KERJA	SYARAT	HASIL
<ul style="list-style-type: none"> • mempertahankan kelompok dari konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • konflik tidak merusak semua struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • perbaikan keadaan dg mewedahi ketidakpuasan thd struktur

Gambar 51. Fokus *safety valve*

- *Kelima*, sebagai bagian dari teori yang menggunakan konsep jaringan, maka penerapannya tidak hanya terpaku pada konsep empiris saja, melainkan bisa juga terkait dengan konsep tinakrif maupun konsep primitif.

B. RESOLUSI KONFLIK REALISTIS

Dalam konflik realistik, komponen utama yang harus diperhatikan adalah: tujuan saingan antagonis dan tuntutan kekecewaan protagonis. Jika keduanya berkorelasi maka dapat disebut sebagai konflik realistik.

1. Antagonis vs Protagonis

Pemilihan Togaten sebagai lokasi gedung sekolah memiliki beberapa tujuan:

- tujuan praktis sebagai wilayah strategis yang mudah diakses dari berbagai penjuru;
- tujuan ekonomis karena sebagai pengembangan lahan yang telah tersedia;³ serta
- tujuan religious sebagai bagian dari dakwah Islamiyah di wilayah yang multikultural.

Dari sudut pandang warga, beberapa tujuan tersebut merupakan “tujuan saingan antagonis”. Hal itu melahirkan beberapa tuntutan kekecewaan mereka sebagai pihak protagonis, yaitu:

- *Pertama*, tuntutan agar pihak sekolah mengatasi lalu lintas jalan kampung yang semula relatif sepi namun

³ Lahan SD Muhammadiyah Plus di wilayah Togaten sudah menjadi hak milik yayasan yang menaunginya jauh sebelum SD tersebut didirikan. Semula di lahan tersebut hanya ada masjid, kemudian ditambah TK, baru kemudian SD.

telah berubah menjadi macet pada jam-jam masuk dan keluar sekolah;

- *Kedua*, tuntutan agar pihak sekolah memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar sebagai etika “terimakasih pendatang” terhadap pribumi atas ijin mengembangkan lembaga di wilayahnya;
- *Ketiga*, tuntutan agar pihak sekolah tidak membuat kebijakan yang melanggar etikanya sebagai pendatang, dalam hal ini agar tidak membuat bangunan sekolah wilayah pribumi tanpa seijin “pemiliknya.”

2. Persoalan Makro

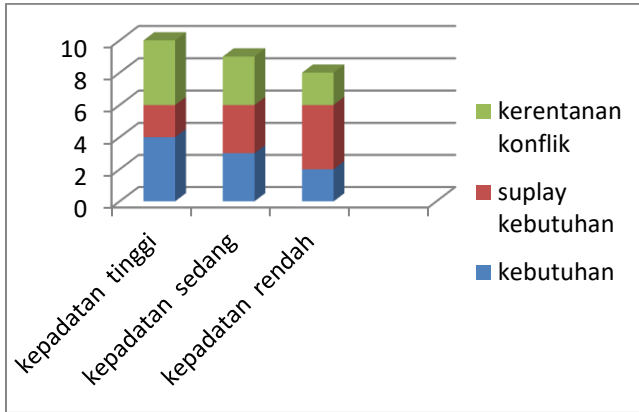
Tuntutan kekecewaan protagonis yang pertama, yaitu agar pihak sekolah mengatasi kemacetan di jalan kampung berkorelasi dengan setting sosio historis Togaten sebagai wilayah berkepadatan penduduk tinggi.

Menurut teori Confusius, Plato dan Aristoteles, tipologi tersebut dapat memicu munculnya konflik karena ada ketidakseimbangan antara lahan dengan kebutuhan pihak sekolah maupun warga. Confucius mengaitkan pandangannya dengan aspek ekonomi. Sedangkan Plato dan Aristoteles selain merelevansikan dengan aspek ekonomi, juga dengan aspek

pertahanan, keamanan dan kepentingan pemerintah (aspek sosial).

Intinya adalah:

- Kepadatan penduduk yang tinggi akan membuat kebutuhan yang muncul juga tinggi, sementara *suplay* kebutuhan justru semakin rendah. Itulah sebabnya kondisi ini tidak sehat.
- Kepadatan penduduk yang rendah pun akan membuat SDA (Sumber Daya Alam) yang ada tidak dapat dikelola secara maksimal.
- Kondisi yang ideal adalah ketika jumlah penduduk sedang karena akan berbanding lurus dengan kebutuhan dan suplay kebutuhan. Semakin padat penduduknya maka semakin tinggi kerentanan konfliknya (Munir, 1986: 6-7). Dengan demikian, ditinjau dari aspek kepadatan penduduknya, Togaten dan sekitarnya termasuk wilayah yang memiliki kerentanan konflik yang tinggi.



Gambar 52. Korelasi antara kepadatan penduduk dengan konflik

3. Beberapa Persoalan Mikro

Sebenarnya, selain SD Muhammadiyah Plus, di Togaten juga ada dua sekolah lainnya yaitu TK Siwi Peni dan Sekolah Anak Pintar (SLB) yang keduanya sama-sama terletak di jalan Suropati Togaten. Namun keduanya tidak memiliki terlalu banyak siswa sehingga tidak menyebabkan kemacetan yang mengganggu warga.

Eksistensi SD Muhammadiyah di masa awal juga tidak menimbulkan masalah (*no conflict*) karena jumlah siswanya belum begitu banyak. Namun seiring perjalanan waktu, SD Muhammadiyah lalu berkembang menjadi salah satu sekolah unggulan di kota Salatiga, sehingga animo masyarakat untuk

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sangat tinggi.⁴ Bagi pihak sekolah, hal ini sangat positif di tengah kondisi beberapa sekolah lain yang cukup sulit untuk mendapatkan jumlah siswa sesuai target. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan beberapa dampak negatif dalam hal ketidakseimbangan antara *suplay* dan kebutuhan, yaitu berupa:

- Keterbatasan ruang kelas dengan jumlah pendaftaranya.
- Sempitnya lahan dengan kebutuhan ruang kegiatan sekolah.
- Keterbatasan lahan parkir dengan jumlah kendaraan yang membutuhkannya.
- Sempitnya jalan kampung dengan banyaknya kendaraan yang melewatinya.

⁴ Pada umumnya sekolah lain menerima pendaftaran murid baru menjelang tahun ajaran baru, yaitu sekitar bulan Juni. Namun mulai bulan Januari SD Muhammadiyah Plus sudah mulai didatangi calon wali murid yang menitipkan Akta Kelahiran anaknya (sebagai ganti ijazah TK yang belum keluar). Sekitar bulan Maret, jumlah pendaftar sudah melebihi jumlah kuota yang tersedia sehingga pendaftaran harus segera ditutup. Tes calon siswa di selenggarakan sekitar Maret-April dan diumumkan 1 atau 2 minggu sesudahnya. Tujuan penyelenggaraan tes seleksi pada jauh hari sebelum tahun ajaran baru ini adalah jika ada calon siswa yang tidak diterima maka jumlahnya tidak terlalu banyak dan mereka masih memiliki kesempatan untuk mendaftar di sekolah lainnya.

Adapun bagi warga sekitar, dampak negatifnya antara lain membuat mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang pada jam-jam sekolah serta tidak nyaman dengan banyaknya kendaraan antar jemput siswa yang menyebabkan kemacetan. Ketidaknyamanan inilah yang akhirnya memunculkan konflik di antara mereka. Berawal dari konflik tahap I sebagai kejengkelan sehari-hari, kemudian meningkat menjadi tahap II berupa tantangan hingga meningkat lagi menjadi tahap III berupa pertentangan terbuka. Tuntutan warga pun meningkat, dari tuntutan yang bersifat kekeluargaan berupa penanganan permasalahan satu persatu hingga tuntutan yang bersifat permusuhan berupa penolakan pendirian sekolah tersebut di wilayah tempat tinggal mereka.



Gambar 53. Korelasi konflik realistik

dan setting sosio historisnya

4. Resolusi

Berdasarkan teori *safety valve*, maka resolusi yang disarankan adalah mengungkapkan rasa tidak puas bagi *in group* melalui penyaluran unsur-unsur negatif yang dihancurkan serta memperbaiki keadaan bagi *out group* melalui penyaluran unsur-unsur positif yang dipertahankan.

Dari satu sisi pihak warga sebagai *in group* telah mengungkapkan rasa tidak puasnya dalam konflik tahap II dan III, dengan demikian penyaluran nilai negatif tersebut sudah terlaksana. Sementara dari sisi lain pihak SD sebagai *out group* terus berusaha untuk memaksimalkan *suplay* atau menyeimbangkan antara *suplay* dengan kebutuhan dalam konteks mikro, dengan demikian sudah ada penyaluran unsur-unsur positif yang dipertahankan. *Suplay* yang dibutuhkan dalam persoalan kemacetan adalah jalan yang luas. Karena jalan kampung di wilayah tersebut tidak mungkin diperlebar, maka pihak sekolah perlu bekerja sama dengan dengan polantas (polisi lalu lintas) dan wali murid sebagai berikut:

- mengubah arus lalu lintas yang semula dua arah dibuat menjadi satu arah pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah sehingga tidak ada lagi pertemuan dua arus yang menyebabkan kemacetan dalam waktu lama;

- membuat kebijakan bagi pengantar (terutama yang menggunakan kendaraan roda empat) agar tidak berhenti selain untuk menurunkan siswa sebentar;
- membuat kebijakan bagi para guru dan karyawan dibantu para siswa yang tergabung sebagai Polisi Sekolah agar siap di pinggir jalan untuk menyeberangkan siswa yang turun dari kendaraan sehingga menghemat waktu bagi wali untuk menyeberangkannya;
- membuat kebijakan bagi wali murid agar mengurangi volume kendaraan dengan mengikutsertakan anak mereka kepada mobil antar jemput yang disediakan oleh pihak sekolah. Jika dalam satu mobil antar jemput dapat menampung sekitar 15 siswa, maka dapat mengurangi arus kendaraan pribadi sebanyak 14 unit, demikian seterusnya pengurangan jumlah arus kendaraan pribadi ini akan bertambah seiring dengan jumlah armada antar jemput yang digunakan, atau wali murid diharapkan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan kendaraan roda empat dengan menggunakan roda dua atau bahkan kalau bisa dengan naik angkutan umum lalu jalan kaki.

C. ***SAFETY VALVE* UNTUK KONFLIK NON REALISTIS**

Berbeda dengan konflik realistis yang terkait erat dengan tujuan antagonis, maka konflik non realistis cenderung muncul karena hubungan saingan. Oleh karena itu hal yang dominan dalam konflik ini tentu saja adalah adanya nuansa hubungan saingan.

1. Konflik “Pereda Hubungan”

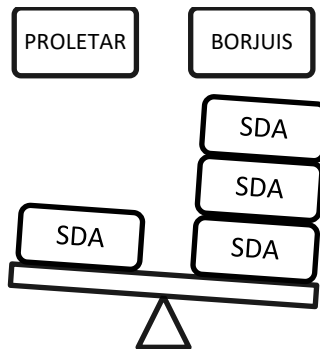
Konflik non realistis dikatakan sebagai konflik “pereda ketegangan” karena bersifat sementara. Selama suatu kelompok menganggap kelompok lain sebagai saingan hubungan saingan maka konflik yang akan muncul tidak hanya satu kali melainkan berkali-kali (horizontal) dalam waktu yang cukup panjang karena adanya *truth claim* dan pandangan stereotip terhadap lawan. Konflik horizontal itulah konflik yang sesungguhnya. Penyebabnya bermacam-macam. Terkait dengan konflik di Togaten dan sekitarnya, maka penyebabnya utamanya adalah karena faktor kesenjangan ekonomi-sosial serta persoalan SARA.

2. Persoalan Makro 1

Tuntutan protagonis yang kedua, yaitu agar pihak sekolah memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar

berkorelasi dengan setting sosio historis Togaten yang memiliki persoalan kesenjangan ekonomi sosial atau persoalan borjuis-proletar.

Secara teoritis, persoalan tersebut dapat muncul karena pembagian sumber daya yang ada tidak merata bagi tiap individu. Ada proletar yang mendapat sedikit bagian dan borjuis yang mendapatkan bagian secara berlimpah.



Gambar 53. Kesenjangan ekonomi-sosial borjuis-proletar

Eksistensi SD Muhammadiyah Plus sebagai sekolah kalangan menengah ke atas telah menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian warga dalam konteks kurangnya perhatian kelompok borjuis terhadap proletar. Meskipun mayoritas warga Togaten dan sekitarnya sebenarnya adalah dari kalangan

menengah ke atas, namun tema kesenjangan ekonomi sosial borjuis proletar kemudian menyeruak karena kelompok proletar beraliansi dengan warga yang tidak menyukai eksistensi SD Muhammadiyah sehingga mereka tergabung dalam kelompok warga pribumi (*in group*) yang berhadapan dengan pihak SD Muhammadiyah sebagai pendatang (*out group*).



Gambar 54. Profil perumahan borjuis-proletar di wilayah Togaten dan sekitarnya

3. Persoalan Makro 2

Tuntutan protagonis yang ketiga, yaitu agar pihak sekolah tidak membuat kebijakan yang melanggar etikanya sebagai pendatang berkorelasi dengan setting sosio historis Togaten sebagai wilayah multikultural dengan dominasi kelompok tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri kehidupan beragama di Salatiga adalah perkembangan umat yang dipengaruhi oleh eksistensi pendatang di suatu daerah. Hal yang unik adalah bahwa di beberapa wilayah, nama disesuaikan dengan morfologinya, misalnya karena suatu wilayah didominasi oleh bangunan umat Kristen dengan cat warna putih, akhirnya wilayah tersebut dikenal dengan sebutan wilayah Salib Putih, demikian juga nama Kauman karena dianggap sebagai daerah para *kaum* (ulama Islam).

Nama Togaten dan Pengilon memang tidak mewakili eksistensi dominasi kelompok tertentu. Namun secara non formal, wilayah tersebut juga dikenal dengan wilayah Perumsat (Perumahan Satya Wacana), sehingga menunjukkan eksistensi dominasi umat Kristen di wilayah setempat karena Satya Wacana atau lengkapnya adalah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) merupakan lembaga pendidikan Kristen besar di Salatiga. Eksistensi dominasi umat Kristen tersebut juga didukung dengan adanya sebuah gereja, asrama pendeta (*father's house*), gedung Pasca Sarjana UKSW dan tentu saja mayoritas warga di luar Perumsat yang memeluk agama Kristen.

Jika suatu wilayah didominasi oleh kelompok agama, ras atau etnik⁵ tertentu maka secara teoritis kelompok yang dominan tersebut cenderung menguasai kelompok yang minoritas. Hal ini kemudian memposisikan umat yang dominan sebagai *in group* sementara umat yang lain sebagai *out group*. Sebagai mayoritas, *in group* memiliki kekuatan yang besar sementara *out group* kurang bebas karena sebagai minoritas, berbagai aktifitas yang mereka lakukan tidak bisa lepas dari dominasi *in group*.⁶ Ketidaksukaan mayoritas terhadap minoritas dapat menimbulkan berbagai tahapan konflik, dari tahapan yang ringan (sekedar keluhan) hingga sikap anarkis sebagai bentuk perlawanan. Jika hal itu dikaitkan dengan posisi pihak SD Muhammadiyah Plus sebagai minoritas maka faktor yang mendorong konflik *in group-out group* adalah sebagai berikut:

⁵ Dominasi tidak hanya berlaku dalam konteks agama namun juga suku dan ras. Contohnya, Bugisan dan Pecinan sebagai daerah yang di dominasi orang Bugis dan China.

⁶ Misalnya sebuah keluarga Kristen yang tinggal di pemukiman muslim, maka agar hidupnya harmonis keluarga tersebut tidak memelihara anjing di rumahnya. Sebab dengan memelihara anjing akan membuatnya tidak disukai oleh warga sekitar yang muslim.

Pertama, sebagai pendatang (*out group*) yang berbeda keyakinan dengan mayoritas warga (*in group*) membuat sekolah tersebut rentan melakukan konflik dengan *in group*. Contohnya pada musim kampanye sekitar bulan Februari-Maret 2013 lalu terdapat *banner* yang bergambar caleg tokoh Kristen yang dipasang berdampingan dengan *banner* penolakan pembangunan gedung SD Muhammadiyah. Peristiwa ini sebenarnya sepele, karena pemasangan gambar caleg adalah hal biasa. Namun menjadi masalah karena dipasang berdampingan dengan *banner* penolakan gedung sekolah Islam sehingga muncul asumsi bahwa penolakan itu karena dukungan sang caleg, yaitu Bapak Teddy Sulistyono yang menjabat sebagai ketua DPRD Salatiga. Beliau kemudian dikonfirmasi oleh tokoh setempat. Ternyata *issue* tersebut tidak benar, semua itu hanyalah oknum semata yang ingin meraih keuntungan di balik persetujuan (Nara Sumber: Bapak Sukarno).

Kedua, muncul asumsi bahwa konflik tersebut terjadi karena persoalan *like and dislike* antara juru dakwah Kristen terhadap lembaga Islam. Jika lahan tersebut menjadi gedung lembaga Islami, ada kekhawatiran bahwa umat binaan di sekitar lokasi dapat kembali ke agama semula. Oleh karena itu rencana pembangunan gedung baru SD Muhammadiyah harus ditolak

(Nara Sumber: Bapak S, warga Togaten). Pandangan Bapak S bertentangan dengan pandangan aktifis lintas agama yang mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Togaten dan sekitarnya adalah *pure non agama*. Alasannya adalah jika wilayah tersebut adalah wilayah rentan konflik agama, maka pasti sudah terjadi sejak dulu (Nara Sumber: Bapak Akbar, aktifis Percik Salatiga). Peneliti mengambil pandangan tengah bahwa wilayah ini memiliki potensi terjadi konflik antar agama, namun karena di dalamnya banyak tokoh lintas agama, maka konflik atas nama agama secara umum hanya berhenti pada tahap I saja.

Ketiga, SD Muhammadiyah Plus adalah *out group* yang berhadapan dengan sesama muslim yang masih menganut sinkretisme Islam - Kejawen atau (meminjam istilah Clifford Geertz) sebagai Muslim Abangan. Meskipun berhadapan dengan sesama muslim namun adanya perbedaan sudut pandang dengan mereka juga rentan terhadap konflik. Apalagi dalam konteks *in group-out group*, tidak jarang mereka justru lebih memilih beraliansi dengan warga non Muslim atas dasar sesama *in group*. Sehingga wajar jika Pak X (yang muslim) mengatasnamakan kemarahannya dalam konteks sebagai warga pribumi bukan sebagai muslim. Asumsi bahwa *Muslim Santri*

di wilayah ini adalah *out group* sudah terjadi sebelum SD Muhammadiyah berdiri karena para pengurus masjid dan mushola serta guru ngaji di wilayah tersebut adalah para pendatang (*out group*). Contohnya adalah alm. mbah Mahalli, seorang guru ngaji pada tahun 1980 an. Pensiunan guru agama ini bukan warga asli melainkan pendatang dari Magelang (Nara Sumber: Bapak Sakbani). Oleh karena itu tidak heran jika sampai akhir tahun 1980 an eksistensi wanita berjilbab masih dianggap aneh oleh masyarakat, termasuk masyarakat setempat yang muslim, hingga sebutan muslimah berjilbab dengan nada stereotip sebagai ninja sangat terkenal saat itu. Sikap ini baru memudar setelah pada tahun 1990 an berdiri STAIN Salatiga dan tahun 2000 an berdiri SD Muhammadiyah di wilayah mereka.

4. Beberapa Konteks Mikro

Beberapa konflik non realistis dalam konteks mikro yang muncul akibat kesenjangan ekonomi sosial dan persoalan SARA adalah:

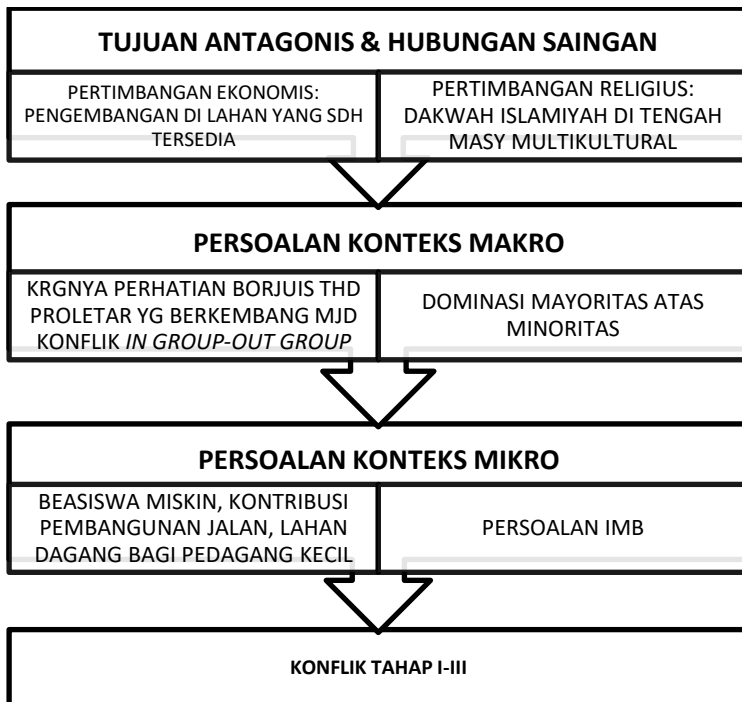
- a. Konflik karena tidak adanya beasiswa miskin bagi warga sekitar yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Persoalan besarnya biaya sekolah, dianggap sebagai indikasi bahwa sekolah ini

materialistis dan hanya berpihak kepada orang-orang yang berduit saja. Sebab warga yang miskin tidak mungkin mampu membayar SPP sebesar Rp. 275.000,- dan uang gedung sebesar Rp. 4. 500.000,-

- b. Konflik karena tidak adanya kontribusi dari pihak sekolah dalam membangun jalan di wilayah Togaten dan sekitarnya. Jalan kampung yang menghubungkan Togaten dan sekitarnya sudah dibangun jauh sebelum SD Muhammadiyah Plus berdiri. Jalan itu murni swadaya masyarakat pada masa lalu, sehingga dalam hal ini pihak SD dianggap sebagai pengguna saja namun justru merepotkan karena menghadirkan kemacetan bagi mereka.
- c. Konflik karena tidak adanya lahan yang memadai bagi para pedagang kecil yang ingin menjajakan dagangan mereka di area sekolah. Pemikiran ini muncul saat Kepala Sekolah membuat kebijakan agar para siswa jajan di kantin sekolah saja, karena selain terjaga kualitas kesehatannya juga tidak menambah kemacetan. Kebijakan ini tentu saja mengecewakan para pedagang kecil yang biasa menggelar

dagangannya di depan sekolah karena mereka kehilangan pelanggan-pelanggan kecil mereka.

- d. Konflik karena persoalan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) SD Muhammadiyah di wilayah Togaten dan Pengilon. Hal itu dianggap bermasalah karena dilakukan tanpa persetujuan suara mayoritas warga, sehingga hal itu dianggap illegal.



Gambar 52. Konflik Non Realistis

5. Resolusi

Berbeda dengan konflik realistis yang umumnya akan selesai jika tuntutan kekecewaan protagonis terhadap antagonis terpenuhi, maka penyelesaian dalam konflik non realistis umumnya hanya bersifat sementara, sekedar untuk meredakan ketegangan. Apalagi jika hal itu menyangkut dominasi mayoritas terhadap minoritas. Menurut Liliweri (2009: 99), kapan dan di mana saja pada ruang dan waktu tertentu, kita berhadapan dengan mayoritas dan minoritas. Namun khusus di Indonesia, mayoritas dan minoritas (apalagi menyentuh agama) adalah sebuah beban sosial dan kultur. Kekuasaan selalu berkaitan dengan mayoritas sehingga jika pengambilan keputusan kurang memperhatikan aspirasi minoritas. Hal inilah tampaknya yang memicu konflik di wilayah Togaten dan sekitarnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Resolusinya adalah:

- a. Bersikap baik dengan semua kalangan terutama dengan membantu fakir miskin sebagaimana ajaran Islam dalam al-Qur'an. Hal itu antara lain diaplikasikan oleh

pihak SD Muhammadiyah dengan cara menggerakkan “Jum’at Bersedekah” bagi para siswa.

- b. Mengenai biaya pendidikan yang dianggap terlalu mahal memang benar jika dibandingkan dengan sekolah negeri yang bersubsidi. Namun biaya tersebut sebenarnya tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah swasta semisal di kota Salatiga. Bahkan ada sekolah lain yang lebih mahal. Jika dihitung secara terperinci, biaya tersebut bahkan terlihat sangat murah karena selain untuk biaya operasional, juga untuk memenuhi fasilitas kebutuhan siswa sendiri dari kebutuhan seragam, buku, makan siang, kegiatan ekstra kokurikuler, kegiatan *out sourcing* dan beberapa kegiatan lainnya.
- c. Mengenai beasiswa, pihak sekolah menyediakannya dengan cara subsidi silang. Tidak adanya beasiswa bagi warga sekitar yang miskin, bukan berarti pihak SD tidak memperhatikan kaum *dhuaffa*’, namun karena mereka memang tidak mendaftarkan diri di sana, entah karena minder, pesimis atautkah karena berbeda agama.
- d. Meskipun upaya melebarkan jalan kampung yang dilalui para pengantar/ penjemput siswa tidak bisa lagi

- dilakukan, karena kanan dan kiri jalan sudah padat dengan rumah penduduk namun pihak sekolah tetap bisa mengurai kemacetan dengan cara mengatur lalu lintas sebaik mungkin sehingga kemacetan berkurang.
- e. Semenjak pihak sekolah melarang siswa-siswinya jajan di luar sekolah, pihak sekolah juga menyadari bahwa kebijakan itu akan membuat para pedagang kecil kecewa. Penyediaan lahan kosong bagi mereka memang tidak mungkin karena pihak sekolah sendiri juga kekurangan lahan. Jadi resolusi yang paling memungkinkan adalah memberi kesempatan mereka untuk menitipkan dagangan di kantin sesuai dengan prosedur jajanan sehat dan terjangkau bagi siswa.
 - f. Adapun resolusi untuk persoalan IMB yang dikatakan sebagai persoalan yang bernuansa SARA, telah dicoba diselesaikan dengan mencari ijin berdasarkan tanda tangan persetujuan warga. Dinas terkait dapat menerimanya. Namun bagi warga yang kontra, cara seperti itu dianggap tidak *fair* karena mereka merasa diintimidasi sehingga membubuhkan begitu saja tanda tangannya. Ketika persoalan ini diangkat ke forum rembug warga mereka menganggap IMB yang telah

dilegalkan tetap tidak sah. Sebagai resolusi untuk menambah ruang, pihak SD membeli lahan seluas 700 m di belakang gedung sekolah lama. Rencananya, gedung tersebut akan dibangun satu pintu dengan gedung lama sehingga tidak akan membuat macet gang sempit di sekitar lahan. Dengan konsep pembangunan berlahan parkir yang luas, diharapkan dapat mengurangi persoalan kemacetan di masa depan. Pihak sekolah akhirnya mengambil keputusan untuk tidak membangun gedung sekolah di wilayah tersebut.

D. KONTRIBUSI NILAI *SAFETY VALVE*

Menghindar dari konflik adalah salah satu manajemen yang efektif untuk menangani kejengkelan sehari-hari (konflik tahap I), karena lebih baik melupakan kejengkelan daripada menghadapinya. Warga Togaten dan sekitarnya yang ingin keluar rumah dengan kendaraan roda empat tanpa kemacetan juga telah berusaha keluar sebelum atau sesudah jam-jam berangkat atau pulang sekolah. Sedangkan bagi mereka yang ingin keluar rumah dengan sepeda motor atau berjalan kaki, dapat memilih jalan pintas yang tidak dilewati kendaraan besar. Namun resolusi seperti itu tidak dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang mendesak sehingga tetap dibutuhkan langkah

yang tepat melalui pengelolaan strategi dengan penuh kesabaran (Hendricks, 2008: 8-10). Dalam konteks inilah *safety valve* diperlukan sebagai alternatif pilihan.

Berdasarkan analisis dengan *safety valve* terhadap konflik di Togaten dan sekitarnya, maka nilai yang dapat menjadi kontribusi strategi pengelolaan konflik di wilayah lain adalah:

1. Nilai-nilai untuk mencegah perlawanan

Konflik realistik seringkali muncul bersamaan dengan konflik non realistik. Sementara jika hal itu tidak dipilah maka penanganannya cenderung disamakan, padahal berbeda. Sebab penanganan konflik realistik adalah dengan mengkorelasikan tuntutan kekecewaan protagonist dengan tujuan antagonis. Sementara dalam konflik non realistik seringkali tidak ada korelasi antara keduanya sebab konflik tersebut muncul karena hubungan saingan. Bisa saja resolusi untuk konflik non realistik dikorelasikan dengan tujuan antagonis, namun sifatnya hanyalah sementara karena selama masing-masing kelompok didominasi *truth claim* maka konflik antar mereka akan terus berlangsung meski hal yang dipersoalkan tidak begitu signifikan.

Terkait fenomena tersebut, maka Coser menyarankan untuk memilah nilai menjadi 2 macam, yaitu nilai negatif yang perlu dihancurkan untuk mewedahi ketidakpuasan *in group* terhadap *out group* serta nilai positif yang harus dipertahankan untuk memperbaiki struktur yang rusak akibat munculnya hubungan saingan.⁷

- a. Nilai-nilai yang dihancurkan adalah: *pertama*, gerakan yang melawan struktur; *kedua*, menghindari konflik tanpa strategi atau membuat strategi secara emosional; *ketiga*, memaknai fungsi konflik sosial secara negatif. Jika fungsi tersebut dimaknai secara negatif, maka akan memperlemah kerangka masyarakat; *keempat*, anggapan bahwa resolusi konflik di suatu tempat adalah sama dengan resolusi di tempat lain tanpa memperhatikan aspek desentralisasi.

⁷ Prinsip mempertahankan struktur nilai yang tidak rusak menunjukkan eksistensi Coser sebagai ilmuwan yang membangun teorinya berdasarkan konsep jaringan. Jadi, meskipun *safety valve* adalah bagian dari “teori konflik”, namun metode tersebut tidak memvalidasi (menentang) teori fungsionalisme struktural. Ia justru menjadikan teorinya sebagai jembatan antara teori fungsionalisme struktural _yang berpandangan bahwa masyarakat ideal adalah masyarakat yang memiliki sistem struktur yang teratur_ dengan teori konflik _yang berpandangan bahwa konflik bukanlah penyakit sosial.

- b. Adapun nilai-nilai yang dipertahankan adalah: *Pertama*, keutuhan struktur sosial, karena selama struktur sosial dalam masyarakat tidak hancur, berarti masyarakat masih memiliki kemampuan internal untuk mengatasi potensi konflik maupun perselisihan, sehingga mereka dapat memperbaiki keadaan, mengungkapkan rasa tidak puas dan menghambat permusuhan. *Kedua*, menyelesaikan konflik dengan strategi yang penuh kesabaran agar resolusi lebih efektif dan efisien. *Ketiga*, memaknai fungsi konflik sosial secara positif. Pemaknaan fungsi konflik secara positif ini dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutuhan dan keseimbangan yang pada akhirnya akan membantu membangun keutuhan struktur sosial. *Keempat*, terkait desentralisasi konflik, maka resolusinya harus disesuaikan dengan setting sosio historisnya. Contoh terkait dengan setting sosio historis masyarakat yang berkepadatan penduduk tinggi, maka resolusinya adalah terkait penyeimbangan antara *suplay* dengan kebutuhan. Lalu terkait setting sosio historis masyarakat yang multikultural, maka resolusinya harus berdasarkan azas pluralisme dan kebersamaan.

2. Nilai-nilai untuk mengurangi tekanan

Cara untuk mendapatkan nilai-nilai ini adalah dengan memperhatikan isu fungsionalitas konflik; fungsi-fungsi konflik sosial; permusuhan dalam hubungan yang erat dan kondisi konflik *in group* – *out group*.

a. Nilai-nilai dalam isu fungsionalitas konflik.

Konflik dapat secara (+) fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara (-) fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur. Mengutip hasil pengamatan Simmel bahwa konflik mungkin (+) sebab dapat meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok dengan memantapkan keutuhan dan keseimbangan. Peningkatan konflik dalam kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan dan ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi, yang menentukan suatu konflik fungsional apa tidak adalah *tipe isu* yang merupakan subyek konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti. (Margaret M 1994). Perlu ditegaskan bahwa masyarakat yang berstruktur longgar, terbuka dan demokratis

membangun perlindungan suatu nilai inti dengan cara dengan membiarkan konflik itu berkembang di sekitar masalah-masalah yang tidak mendasar. Amerika sebagai contohnya dari masyarakat berstruktur longgar dan terbuka di mana pada negara tersebut terdapat suatu konflik mengenai berbagai masalah, mulai dari abortus, nuklir dan masalah perpajakan. Oleh karena masalah-masalah tersebut tidak menyangkut nilai-nilai inti, maka konflik yang seperti ini tak membahayakan struktur sosial. Ini malah dapat meningkatkan solidaritas struktural di mana berbagai kelompok bisa memiliki pandangan yang berbeda tetapi dengan masalah yang berbeda pula (Coser dalam Rubin, 2004).

b. *Fungsi-fungsi konflik sosial.*

Landasan tentang nilai/ aksiologi suatu ilmu terbagi menjadi 2, yaitu nilai murni (Aristoteles) dan nilai terapan (Francis Bacon) (Kuliah Filsafat Ilmu Lik Wilardjo, 2011). Nilai-nilai fungsi konflik sosial cenderung pada nilai-nilai ideal Francis Bacon (nilai dari ilmu terapan) sebab berbicara tentang ilmu riil, yaitu: dapat memperkuat solidaritas kelompok yang

agak longgar;⁸ dapat menghasilkan solidaritas dan bisa menghantarnya pada aliansi-aliansi dengan kelompok lain;⁹ dapat menyebabkan anggota-anggota masyarakat yang terisolir menjadi berperan secara aktif;¹⁰ dan dapat berfungsi untuk berkomunikasi¹¹ (Cosser dalam Rubin, 2004).

⁸ Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi, konflik dengan masyarakat lain bisa menjadi kekuatan yang mempersatukan. Sebelum terjadi konflik SD vs warga, misalnya. Hubungan antara sebagian wali murid dan pengelola sekolah biasa saja. Namun setelah konflik ini terjadi, beberapa wali merasa geram dengan pihak yang menolak pembangunan gedung sekolah dan ingin membelanya. Sebaliknya sebagian warga yang semula acuh tak acuh dengan rencana pembangunan gedung sekolah akhirnya bersepakat untuk menolaknya.

⁹ Perbedaan keyakinan antara *out group* (pihak SD Muhammadiyah) dengan *in group* (warga) adalah alat yang paling efektif untuk menggalang massa meskipun kasus ini murni bukan kasus agama.

¹⁰ Salah satu alasan penolakan warga antara lain terkait ketidakmampuan warga miskin di sekitar untuk menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah sehingga pihak SD dianggap tidak mampu memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, warga kurang mampu tersebut bagian dari anggota masyarakat yang terisolir. Mereka enggan mengemukakan persoalannya karena lingkungan mereka adalah warga yang mampu dan mayoritas mereka berbeda keyakinan. Namun dengan adanya kasus ini, mereka menjadi berani mengemukakan persoalannya.

¹¹ Sebelum terjadi konflik, anggota-anggota masyarakat akan berkumpul, merencanakan apa yang akan dilakukan. Lewat tukar-menukar pikiran itu mereka bisa mendapat gambaran yang lebih jelas

c. *Permusuhan dalam hubungan yang erat.*

Kemungkinan seseorang terlibat dalam konflik realistik tanpa sikap permusuhan atau agresif. Semakin dekat suatu hubungan semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder, misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif bebas diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer di mana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya bagi hubungan tersebut (Cosser dalam Margaret M, 1994). Paradoksnya adalah semakin dekat hubungan semakin sulit rasa permusuhan itu diungkapkan. Tetapi semakin lama perasaan demikian ditekan, maka semakin penting pengungkapannya demi mempertahankan hubungan itu sendiri. Karena dalam suatu hubungan yang intim

akan apa yang harus dibuat, entah untuk mengalahkan lawan atau menciptakan perdamaian (Raho, 2007: 83-84). Dalam konteks ini wadah pertemuan warga dan forum komunikasi pihak sekolah betul-betul memiliki peran yang sangat signifikan.

keseluruhan kepribadian sangat boleh jadi terlibat, maka konflik itu, ketika benar-benar meledak, mungkin sekali akan sangat keras. Tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan yang demikian. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedang tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan ada suasana yang benar-benar kacau (Coser dalam Rubin, 2004).

d. *Kondisi konflik in group – out group*

Konflik dengan kelompok luar akan membantu pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya juga akan mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Bilamana konsensus dasar suatu kelompok lemah, maka ancaman dari luar menjurus bukan pada peningkatan kohesi tetapi pada apati umum, dan mengakibatkan suatu kelompok itu terancam pada perpecahan. Misalnya bilamana suatu kelompok yang sudah solid sejak awal berdirinya maka bila ada konflik di dalamnya tidak akan menimbulkan satu masalah apapun (Coser dalam Rubin, 2004)

3. Peran Kaum Intelektual

Terkait bangunan sistem masyarakat yang tidak benar, C. Wright Mills berkeyakinan bahwa untuk menciptakan suatu masyarakat yang baik atas dasar pengetahuan adalah suatu keniscayaan dan kaum intelektual berkewajiban mengambil tanggung jawab ini, yakni menciptakan masyarakat yang baik (Raho, 2007: 90). Kaum intelektual bisa terdiri dari tokoh masyarakat, aparat maupun dinas terkait, karena mereka lah yang memiliki otoritas politik.

Hal ini dapat dikaitkan dengan salah satu proposisi Simmel yang kemudian menjadi dasar pemikiran Coser, bahwa konflik superordinat-subordinat mungkin terjadi karena tarikan otoritas politik. Artinya, konflik ini tidak semata-mata antara *out group* dengan *in group* saja namun juga dengan otoritas politiknya, karena bagaimanapun juga, lemah atau kuatnya kelompok tergantung otoritas politik sang pemimpinnya. Konflik antara superordinat dengan subordinat dimungkinkan terjadi melalui kepemimpinan yang karismatik yang dapat memobilisasi subordinat atau super ordinat. Melalui kepemimpinan yang karismatik, konflik dapat memberi tekanan yang kuat terhadap pihak lawan atau sebaliknya berhasil menyatukan pertikaian.

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penolakan pembangunan gedung sekolah SD Muhammadiyah oleh warga merupakan indikasi adanya konflik, baik realistik maupun non realistik. Dalam konflik realistik, komponen utama yang harus diperhatikan adalah: tujuan saingan antagonis dan tuntutan kekecewaan protagonis. Jika keduanya berkorelasi maka dapat disebut sebagai konflik realistik. Sedangkan dalam konflik non realistik cenderung muncul karena hubungan saingan.

2. Konflik terjadi karena adanya kekecewaan protagonis terhadap antagonis. Pemilihan Togaten sebagai lokasi gedung sekolah memiliki beberapa tujuan yaitu tujuan praktis sebagai wilayah strategis yang mudah diakses dari berbagai penjuru; tujuan ekonomis karena sebagai pengembangan lahan yang telah tersedia; serta tujuan religious sebagai bagian dari dakwah Islamiyah di wilayah yang multikultural.

Adapun tuntutan kekecewaan protagonis adalah:

- *Pertama*, agar pihak sekolah mengatasi kemacetan lalu lintas jalan kampung. Hal ini memunculkan konflik realistis sehingga dapat diselesaikan dengan pengaturan lalu lintas yang baik dan penyediaan lahan parkir yang memadai;
- *Kedua*, memberi kontribusi kepada masyarakat sekitar sebagai etika “terimakasih pendatang” terhadap pribumi. Konflik ini non realistis karena sebenarnya IMB sudah dilakukan, namun konflik masih berlangsung, karena yang terjadi sebenarnya adalah hubungan saingan;
- *Ketiga*, tidak membuat kebijakan yang melanggar etikanya sebagai pendatang, dalam hal ini agar tidak

membuat bangunan sekolah wilayah pribumi tanpa seijin “pemiliknya.” Konflik ini juga non realistis karena baik pihak yang menentang maupun yang ditentang sama-sama warga di wilayah yang sama. Jadi resolusi yang sesungguhnya adalah bagaimana cara menyatukan mereka.

3. Kontribusi penerapan *safety valve* di Togaten bagi konflik lain adalah berupa:
 - *Pertama*, nilai-nilai untuk mencegah perlawanan, yang meliputi nilai negatif yang perlu dihancurkan untuk mawadahi ketidakpuasan *in group* terhadap *out group* serta nilai positif yang harus dipertahankan untuk memperbaiki struktur yang rusak akibat munculnya hubungan saingan.
 - *Kedua*, nilai-nilai untuk mengurangi tekanan dan menyempurnakan system, yang meliputi nilai-nilai dalam isu fungsionalitas konflik; fungsi-fungsi konflik sosial; permusuhan dalam hubungan yang erat dan kondisi konflik *in group – out group*.

4. SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang *Mencari Safety Valve untuk Togaten*, maka demi lebih dalam dan luasnya

pembahasan seputar persoalan konflik, peneliti akan mengemukakan kemungkinan celah yang bisa dijadikan penelitian lanjutan, dengan pertimbangan:

1. Penelitian ini masih menggunakan metode fungsionalisme konflik yang hanya mencoba mengungkap resolusi dari fungsi-fungsi konflik sosial, maka akan lebih bagus jika konsep jaringan yang dicanangkan Coser terhadap teori ini lebih diperdalam. Misalnya dengan membandingkan bagaimana jika konflik ini ditelaah dengan teori konflik secara umum atau dengan teori sosiologi klasik?
2. Bagi kalangan pemerhati filsafat ilmu, semua ilmu memang memiliki landasan ontologism, epistemologis dan aksiologis. Jika dalam hal ini yang peneliti soroti adalah bagian dari teori sosiologi maka akan lebih bagus jika bisa disoroti dari teori lain.
3. Konsep-konsep dalam metode *safety valve* masih mengutamakan *in put* dari aspek realitas yang tentu saja hal ini terkait dengan konflik realistik dan non realistik. Oleh karena itu ada kemungkinan *in put* konflik dari aspek yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dewi Fortuna (Ed.), dkk, *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Bertram, Christoph, *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Habib, Achmad, *Konflik Antar Etnik di Pedesaan: Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa*, Kata Pengantar: Prof. Dr. David Reeve, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Hendricks, William, *Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Arif Santoso, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Jamil, M. Muchsin (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Kata Pengantar: M. Muchsin Jamil, Semarang: WMC, 2007.
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: WMC, 2007.
- Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Rohmad, Abu, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Editor: M. Muchsin Djamil, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Turner, Jonathan, H, *The Structure of Sociological Theory*, Homewood, Illionis: The Dorsey Press, 1974
- Utsman, Sabian, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat: Sebuah Penelitian Sosiologis*, Kata Pengantar: Prof. Dr. Salladien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007